



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, MENGHADIRKAN DIREKTUR
UTAMA PT GARAM (PERSERO) SERTA DIRUT PT PERIKANAN
INDONESIA (PERSERO)**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 17 (tujuh belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 22 September 2022
Waktu : Pukul 11.00 s.d.13.15 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-P.GERINDRA)
- Acara : Membahas penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
30 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 dari 11 orang Anggota:
1) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
2) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A. (Virtual)
3) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
4) Maria Lestari, S.Pd.
5) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (Virtual)
2. Fraksi Partai Golongan Karya
4 dari 8 orang Anggota:
1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI (Virtual)
2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3) Alien Mus
4) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
5 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si.
 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
1 dari 6 orang Anggota:
 - 1) Yessy Melania, S.E.
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota:
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos.
 - 3) Daniel Johan, S.E.
 - 4) Edward Tanur, S.H.
 6. Fraksi Partai Demokrat
4 dari 5 orang Anggota:
 - 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
 - 4) Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota:
 - 1) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 2) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 3) H. Johan Rosihan, S.T.
 - 4) Saadiah Uluputty, S.T.
 8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 3 orang Anggota:
 - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
 - 2) Ir. Alimin Abdullah (Virtual)
 9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota:
 - 1) Ema Umiyyatul Chusnah (Virtual)
- B. Anggota Izin
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:
 - Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 2. Fraksi Partai Demokrat:
 - Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

C. Pemerintah

1. Menteri Kelautan dan Perikanan (Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.);
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Ir. Muhammad Zaini Hanafi, M.Si.);
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dr. TB Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.);
5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.);
6. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc.);
8. Plt. Inspektur Jenderal (Ir. Teuku Nilwan, M.M.);
9. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Sigit Muhartono); dan
10. Direktur Utama PT Garam (Arif Haendra).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Shalom,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Perikanan Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama PT Garam beserta jajaran dan hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja ini dalam keadaan sehat. Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022--2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 23 Juni 2022 dan keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2022, pada hari ini Kamis, tanggal 22 September 2022, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas penyesuaian penyempurnaan RKH Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)

Saya mohon Pak Ansi Lema mendampingi saya pada pagi hari ini karena beberapa Pimpinan ada kesibukan lain, tapi ada yang mau menyusul, jadi terima kasih Pak Ansi mendampingi pada rapat kerja hari ini.

Rapat kerja hari ini kita mulai pukul 11.00 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.00 WIB. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama. Saya harap, moga-moga meskipun diakhiri targetnya jam 14.00 WIB tapi kalau memungkinkan lebih cepat lebih baik yang penting kita semua sepaham seirama dan semoga untuk tahun 2023 bisa menjadi mitra yang baik.

Agenda acara sebagai berikut: pertama, pengantar ketua rapat; kedua, penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda rapat; ketiga, tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI; keempat, jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan; lima, kesimpulan rapat; dan enam, penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui, tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, antara lain: membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran dan komisi menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagai bahan akhir penetapan APBN. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 170 ayat (2) sampai dengan ayat (4) bahwa "Anggota Badan Anggaran dari komisi bersama Badan Anggaran membahas alokasi anggaran kementerian/lembaga yang telah diputuskan oleh komisi dan hasil pembahasannya disampaikan kembali kepada komisi yang bersangkutan secara tertulis." Selanjutnya, "Komisi bersama mitra kerja membahas alokasi anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan oleh komisi kepada Badan Anggaran untuk mendapat penetapan."

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan rapat kerja pada hari ini adalah berdasarkan surat Badan Anggaran Nomor: AG/16721/AG.05.02/09/...

maaf, /09/2022 tanggal 20 September 2022 mengenai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2023. Berdasarkan surat Badan Anggaran tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar 6,767.7 triliun rupiah. Untuk itu, pada rapat kerja hari ini, Komisi IV DPR RI akan melakukan persetujuan pagu anggaran yang mengacu kepada rancangan rencana kerja dan program yang telah diusulkan.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI berharap semangat dan komitmen harus tetap dijaga dalam optimalisasi kinerja untuk pembangunan sektor kelautan perikanan. Selain itu, semangat mencapai opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian juga harus tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara yang sehat dan akuntabel, peningkatan produktivitas, peningkatan nilai tambah yang berdaya saing di sektor kelautan perikanan harus mampu menjadi sumber penggerak ekonomi bangsa dalam penyediaan pangan nasional dan dunia.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Demikianlah pengantar yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas.

Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan rapat kerja yang membahas agenda pokok, yaitu: Rencana Kerja dan Anggaran KKP Tahun 2023 berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Berkaitan dengan usulan rencana... rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, izinkan pertamama kami menyampaikan target Indikator Kinerja Utama KKP sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023 antara lain: pertumbuhan PDB perikanan 4--6%; produksi perikanan 30,31 juta ton; ekspor

hasil perikanan \$7,66 miliar; angka konsumsi ikan 61, kg perkapita per tahun; nilai tukar nelayan 107; luas kawasan konservasi 29,1 juta hektar dengan persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan 97%.

Berdasarkan surat menteri, Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas Nomor: S.617 dan B.577 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023, KKP mendapatkan pagu anggaran tahun 2023 sebesar 6,77 triliun yang terdiri dari rupiah murni sebesar 6,46 triliun, rupiah murni pendamping sebesar 1 miliar rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 160,55 miliar, Badan Layanan Umum sebesar 72,47 miliar dan pinjaman luar negeri sebesar 76,15 miliar. Adapun menurut penggunaannya untuk kegiatan operasional dialokasikan sebesar 2,67 triliun, non-operasional sebesar 3,43 triliun dengan tambahan pagu anggaran sebesar 663,23 miliar.

Untuk rancangan pagu anggaran KKP berdasarkan program adalah sebagai berikut: program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar 2,45 triliun; program nilai tambah dan daya saing industri sebesar 184,17 miliar; program kualitas lingkungan hidup sebesar 91,8 miliar; program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 327,3 miliar; dan program dukungan manajemen sebesar 3,71 triliun, sehingga usulan pagu anggaran berdasarkan unit kerja Eselon I KKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, Sekretariat Jenderal sebesar 678,16 miliar rupiah; Inspektorat Jenderal sebesar 85,31 miliar rupiah; Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar 955,65 miliar rupiah; Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar 1,18 triliun rupiah; Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 1,15 triliun rupiah; Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar 388,5 miliar rupiah; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar 420 miliar rupiah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 1,38 triliun rupiah; dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan sebesar 523,5 miliar rupiah. Dengan komposisi rupiah murni sebesar 6,46 triliun, PHLN sebesar 77,14 miliar rupiah, PNBPN sebesar 160,54 miliar rupiah, dan PNBPN BLU sebesar 72,47 miliar rupiah.

Terkait dengan PHLN, dapat kami laporkan pula bahwa rencana penarikan pinjaman luar negeri tahun 2023 adalah sebesar 76,15 miliar rupiah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan kelautan dan perikanan yang telah tertuang dalam dokumen Green Book Tahun 2022. Rencana penarikan ini adalah untuk tahun pertama dengan durasi proyek selama lima tahun.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Usulan rencana penggunaan tambahan anggaran KKP tahun 2023 sebesar 663,23 miliar rupiah akan digunakan untuk menambakan alokasi bantuan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi. Sarana prasarana untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta penyediaan sistem rantai dingin dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penambahan biaya operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, peningkatan kapasitas SDM,

penguatan sarana uji mutu, peningkatan sarana prasarana pengawasan berbasis teknologi satelit serta penguatan pengawasan internal.

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan *highlight* rencana Rancangan Kegiatan Prioritas KKP Tahun 2023 sebagai berikut. Ditjen Perikanan Tangkap dengan anggaran 955,65 miliar digunakan antara lain untuk implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan kampung nelayan maju dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan; Ditjen Perikanan Budidaya dengan anggaran 1,18 triliun rupiah digunakan antara lain untuk pengembangan perikanan budidaya, untuk peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan, rumput laut serta pengembangan perikanan budidaya di kawasan sentra produksi termasuk Kampung Perikanan Budidaya; Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KKP dengan anggaran 388,50 miliar rupiah digunakan antara lain untuk peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pembangunan sistem rantai dingin, pengembangan usaha dan investasi serta promosi produk skala internasional; Ditjen Perencanaan Ruang Laut dengan anggaran 420 miliar digunakan antara lain untuk pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk Gerakan Bulan Cinta Laut, pengelolaan garam rakyat dan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut; Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dengan anggaran 1,15 triliun rupiah digunakan antara lain untuk operasi pengawasan penangkapan ikan terukur melalui operasional kapal pengawasan dan pengawas pesawat patroli, pengawasan usaha sektor kelautan dan perikanan dan pemberdayaan Pokmaswas; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan anggaran 1,38 triliun rupiah digunakan antara lain untuk pelatihan usaha bagi masyarakat, penyuluhan pada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan vokasi serta pengembangan inkubasi usaha kelautan dan perikanan; Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan anggaran 523,50 miliar digunakan antara lain untuk penerapan sistem jaminan mutu, penerapan sistem perkarantinaan, pengembangan laboratorium referensi dan akreditasi dan pengawasan di wilayah perbatasan; Sekretaris Jenderal dengan anggaran 678,16 miliar rupiah digunakan antara lain untuk layanan penyiapan produk hukum, SDM aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antar lembaga, umum dan pengadaan barang dan jasa humas dan kerja sama luar negeri, data statistik dan informasi dan pengelolaan dana pengelolaan LPMKP; Inspektorat Jenderal dengan anggaran 85,31 miliar rupiah digunakan untuk pengawasan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, petambak garam serta masyarakat pesisir lainnya, maka KKP berkomitmen untuk melaksanakan program bantuan pemerintah di tahun 2023 termasuk pembangunan di wilayah timur Indonesia dalam rangka mendukung Lumbung Ikan Nasional. Apabila usulan kami ini dapat disetujui, maka kami siap untuk menandatangani komitmen kami untuk pelaksanaan di tahun 2023.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami pada kesempatan rapat kerja kali ini. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ketua, Bapak dan Ibu seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat besar pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan atas penjelasan yang telah disampaikan.

Saya rasa setelah beberapa kali rapat kerja dan RDP banyak sekali pendalaman yang sudah dilaksanakan dan tentunya ada beberapa persamaan persepsi, banyak juga masukan dari Anggota-anggota. Namun, hari ini tidak ada salahnya kita masih berikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing mengenai rencana anggaran KKP tahun 2023. Untuk itu, kami persilakan masing-masing juru bicara fraksi yang sudah disampaikan dan kalau nanti masih ada yang mau menyampaikan pendalaman sepatah, dua kata juga akan kami persilakan.

Kita langsung saja yang pertama kami berikan kesempatan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra Pak Azikin Solthan. Pak Azikin, silakan Pak.

F-P. GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sekretaris Jenderal dan pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sama saya hormati,

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam Indonesia Raya*

Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga pada hari

ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna melaksanakan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya fungsi legislasi, fungsi *budgeting*, dan fungsi kontrol.

Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan beberapa tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut.

Satu, Fraksi Partai Gerindra memahami bahwa Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sebesar 6,76 triliun yang telah disahkan oleh Badan Anggaran DPR, belum memuaskan kita semua karena dengan jumlah anggaran tersebut KKP diharuskan menyelesaikan banyak persoalan dan tantangan sektor kelautan dan perikanan yang begitu kompleks. Namun demikian, kami meminta kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajarannya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya, terutama meningkatkan penguasaan terhadap hasil kekayaan laut, pemeliharaan dan peningkatan fasilitas kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan hasil laut serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di tengah kesulitan dan tekanan ekonomi saat ini, sehingga tujuh indikator kinerja KKP dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2023 dapat terwujud. Namun demikian, kami juga meminta dan mengingatkan agar program-program dukungan yang akan diberikan dapat tepat waktu dan sesuai dengan komitmen yang kita sepakati.

Dua, usaha rencana kerja perikanan tahun anggaran 2023 untuk kegiatan prioritas program, pengelolaan perikanan dan kelautan terdapat fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan untuk 10.000 bidang dengan anggaran 3,92 miliar. Fraksi Partai Gerindra minta penjelasan bagaimana KKP menilai per satu bidang dalam mensertifikasi hak atas tanah nelayan dan berapa kisaran atau acuan luas lahan per satu nelayan yang dapat disertifikasi oleh KKP.

Tiga, Fraksi Partai Gerindra meminta Menteri Kelautan dan Perikanan agar peruntukkan habitat tahun 2023 lebih masif dan fokus pada kegiatan yang melibatkan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, UMKM kelautan dan perikanan, petambak garam dan masyarakat pesisir serta langsung pesisir, pesisir secara langsung sehingga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan peningkatan, meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, kegiatan seperti Bulan Cinta Laut, Kampung Nelayan Maju, Bakti Nelayan, Gemar Ikan, Bulan Mutu Karantina, pabrik es, bimbingan teknis atau sosialisasi dan kegiatan padat karya lainnya perlu ditambah setiap Dapil Anggota Komisi IV yang potensial di sektor kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, Bimtek pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan di tahun anggaran 2022 pada Direktorat Jenderal BPSDM memiliki anggaran yang paling rendah dibandingkan dengan Direktorat Jenderal lainnya, meskipun tahun anggaran 2023 sudah ada peningkatan anggaran yaitu 726.000 menjadi, per orang menjadi 888.826 untuk tahun anggaran 2023. Fraksi Gerindra meminta KKP untuk dapat meningkatkan porsi anggaran yang ada.

Yang terakhir, Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi KKP yang telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN dan DPKPM agar setiap pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh orang asing dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas 1.000 Km bujur sangkar mendapat rekomendasi dari KKP. Dalam hal ini, kami meminta agar KKP dapat menjadi *leading sector* pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil serta mendorong peninjauan peraturan mengenai pertambangan di pulau-pulau kecil, mengingat munculnya berbagai kasus sosial dan lingkungan akibat dampak buruk kegiatan pertambangan yang ada.

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Partai Fraksi Gerindra. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Billahi fishabil haq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Azikin Solthan.

Berikutnya, kami persilakan Abang kita Bang Salim Fakhry, juru bicara Partai Golkar. Siap-siap Bapak Haerudin Fraksi PAN.

Pak Salim yang terhormat, waktu dan tempat, kami persilakan.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Baik.

Yang kami hormati Bapak Pimpinan Rapat, Pak Budi.
Selamat kepada Pak Ansi yang sudah duduk di depan,
Pak Menteri dan jajarannya yang kami hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sebagai umat beragama, jangan lupa-lupa, Pak, kita terlebih dulu panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan rapat kerja antara kita, Komisi IV dengan mitra kita, Kementerian KKP.

Saya langsung saja, Pak Ketua. Dari pagu anggaran 6,7 triliun lebih kurang, apa yang dirasakan dipaparkan oleh rekan kami, Fraksi Gerindra pasti kita semua merasakan, 6,7 triliun dengan Indonesia lautannya yang sungguh luar biasa sudah dipastikan dengan anggaran tersebut sangat-sangat tidak memadai. Namun, kita yakin dengan semangat dan kinerja dari kementerian khususnya dipimpin oleh Bapak Menteri dan rekan-rekan, bukan karena anggaran yang sangat minim ini membuat mitra kita di Kementerian KKP tidak bersemangat. Begitu juga, saya melihat dalam paparan dari Bapak Menteri, apa yang disajikan per *item* per Dirjen sudah dipaparkan, dan ini sudah kita

bahas Pak Pimpinan beberapa kali baik dalam RDP dan Raker. Setelah dari Banggar sudah disepakati, maka 6,7T pagu anggaran dari mitra kita Kementerian KKP.

Yang pertama Pak Menteri, kita berharap nanti melalui Pimpinan Rapat ini enggak usah bertele-tele ya, Pak, konkret saja *toh* ini anggaran *kan* tinggal kita koreksi. Pandangan kami dari Fraksi Golkar sudah kita bahas, hari ini *kan* tinggal kita sahkan. Mana yang kurang, itu yang kita perlu koreksi. Mana yang tidak pas, itu yang perlu kita berikan masukan. Artinya, kita memberikan masukan bukan merupakan kritikan tapi masukan untuk agar Kementerian KKP ini sesuai dengan fungsi kita sebagai Anggota DPR RI.

Seminggu yang lalu Pak Menteri, kunjungan kami ke Kepri sangat bagus sambutan dari Dirjen Bapak. Wajar Pak Bintang 2 karena saya tidak pernah melihat Pak Sudin pun pakai salam komando, salam hormat dengan senjata, Pak. Betul, kalau ada yang kawan-kawan Kepri itu bangga Pimpinan dari itu. Ravindra ikut dibilang "Hormat senjata gerak". Pak Sudin pun hampir salah hormat. Masalahnya Pak Sudin enggak hadir ini. Cuma ada aneh Pak, rupanya kapal yang ikut menyeberangkan kami, Pak, hari itu hari terakhir, Pak, bisa beroperasi karena apa BBM-nya enggak cukup. Mungkin dengan di PDSKP ini ada 1,15 T ini, Pak. Ke depannya tolong kita berpikir Pak Menteri, sebab ketika pemaparan kami di Kepri apa yang dilakukan oleh kapal tersebut melalui pemaparan kapten kapal, Pak Suardi, dia menangkap BB benih apa lobster. Kalau dihargakan Pak Menteri lebih kurang 66 miliar. Rupanya Bapak ini gajinya 3 juta per bulan. Di situ ketika dialog kami bersama kawan-kawan dengan kapten-kapten kapal di situlah keterbukaan. Beliau tinggal di Bangka Belitung hanya bisa pulang enam bulan sekali. Coba bayangkan Pak Ansi, kalau Bapak tidak ketemu dengan istri Bapak 6 hari saja, apa yang terjadi? Ini sekedar kita bayangkan saja karena beliau Pimpinan di depan.

Jadinya Pak, tolong kita pikirkan Pak melalui Pak Dirjen, andaikan semangat kapten kapal dan krunya untuk menangkap kapal-kapal yang ilegal, menurut kami, menurut saya, saya yakin dan teman-teman semua bisa kasih *reward*, Pak Menteri. Sayang Pak Menteri hanya 3 juta, Pak, gagahnya luar biasa, pakai senjata, pakai ini, gaji pun 3 juta, Pak. 66 miliar yang dia tangkap, apa salah, Pimpinan, dikasih *reward* mereka itu supaya semangat mereka ini, Pak, untuk memburu. Padahal, satu itu ada kecil orangnya hitam lagi, kalau menurut ukuran saya kapten kapalnya itu mungkin kaptel kapal terjelek seluruh Indonesia cuma pemberani, Pak Menteri. Mungkin Pak Dirjen yang hafal namanya ini, itu satu.

Yang kedua, khususnya Fraksi Golkar dan 9 fraksi mendukung apa yang Bapak sajikan sebenarnya tidak usah kami protes lagi, Pak, karena Eselon I--Eselon II Bapak ini ahli semua. Saya kira *kan* tinggal kita sepakati, Pak Pimpinan. Intinya Komisi IV mendukung seluruhnya kegiatan dari Kementerian KKP. Saya kira enggak ada satu fraksi pun, Pak, terutama Fraksi Golkar yang sangat mendukung, Bapak. Kalau sudah kita dukung, Pak, kami ini fungsi kami *kan* ada tiga, Pak, salah satu pengawasan. Wajar, Pak, macam yang di Aceh itu, Pak, sudah masuk mungkin itu sudah syukur *alhamdulillah*, kalau tidak kita ingatkan. Tadi Pak, Fraksi Gerindra sudah menyatakan, Pak, ada beberapa

item Pak, Bapak itu mempunyai catatan yang lengkap Pak, saya enggak pandai pakai catatan, Pak, masalah Bimtek Pak.

Ini masukan, Pak Ketua. Saya kira tiga kementerian kita KKP bagus, KLHK bagus, Mentan bagus, cuman ada beda saya tengok Pak Menteri. Mana bedanya, Pak? Dalam Raker ini, ini bukan kritikan, Pak, memberikan masukan kepada Bapak. Pak Sekjen sudah kami jelaskan sudah memanggil hari itu Biro Perencanaan. *Kok* beda sistem Bimtek dengan kedua kementerian? Mohon maaf, Pak, kalau di Kementerian Bapak, Anggota kami, staf kami ada 10 yang Bapak punya 20 datang, Pak, uang itu habis ke situ. Mungkin kawan-kawan saya enggak tahulah, yang kami rasakan pribadi seperti itu. Kalau LHK, kalau Kementan, saya kira sudah terprogram, terprogram baik. Apa salahnya Pak, melalui Raker yang apa ini kami memberikan masukan. Disamakan, Pak, kadang-kadang, Pak, saya di Aceh salah-salah nanti, Pak, kalau yang dari Jakarta Pak Direktur hadir syukur *alhamdulillah*, Pak. Ini datang dari Banda Aceh lagi, Pak, datang dari Medan, pemikiran kami sebagai Anggota Dewan apalagi ini, Pak, tahun politik, Pak. Kami juga bisa apa yang bisa kami dapat, Pak, keuntungan politik kami. Kami bisa bertemu dengan para pemilih kami, kami bisa bertemu dengan para kelompok-kelompok perikanan itu yang kami inginkan. Pak Irjen juga jangan catat-catat saja, Pak, Bapak ingatkan supaya ini terpola dengan bagus.

Di beberapa Kementerian, Pak, di sini ada perikanan, saya terima apa, Pak, Direktur Utama Perikanan Indonesia entah Direktur-Direktur apa lagi Pak. Kenapa di Kementan, Pak Ketua, perhatikan dulu ini, Pak. Kenapa di Kementan tersebut umpamanya yang sawit bisa buat FGD, BRGM bisa buat FGD, apalagi? saya ini ID Food, sering Food ID saya bilang, Pupuk Indonesia ini pun melalui Raker ini, Pak. Alangkah, kami tetap dukung program Kementerian KKP. Bapak pun ya sekedar apa, Pak, ini di sinilah kami yang bisa Pak berinteraksi dengan para pemilih kami.

Ini masukkan karena berani saya ngomong sini, Pak, karena Ketua enggak ada di sini, Pak. Kalau ada Ketua di sini, lama kali ngomong “cukup, cukup” dibilangnya. Salah-salah, kita pula marah sama dia nanti.

Saya kira ini perlu, Pak Ketua, sistem Bimtek ini menurut dari Fraksi kami. Tadi Pak Azikin Solthan mungkin Fraksi Gerindra juga tadi mungkin itu yang diangkat, Pak, cuman saya perjelas, 2023 ini mohon, Pak, jangan kecil-kecil kali biaya Bimtek itu buat, Pak, nanti serapan anggaran di Kementerian Bapak, saya tengok sekarang baru berapa persen, Pak. Kalau Bimtek itu kita apa kan serapannya cepat. Bukan untuk kami pribadi, Pak, supaya kelompok-kelompok tani yang mendapat bantuan tersebut ada manfaatnya bagi dia dan ilmu juga dia dapat. Sistem, kami mohon untuk diubah.

Saya kira, Pak Ketua, begini kita sepakatnya jangan lama-lama Pak Ketua, enggak usah dalam-dalam kali, Bapak Ketua. Kesimpulannya itulah kalau mau kita, Pak, berteduh antara Komisi IV dan KKP ini, Pak, yang sejuk, berteduhlah di pohon yang rindang di pohon beringin, Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Salim.

Saya rasa itu catatan-catatan penting ya berdasarkan mungkin masukan dan pengalaman dari anggota-anggota yang sudah melaksanakan kegiatan Bimtek di Dapilnya masing-masing. Ya, Pak Menteri, saya rasa juga tahu lah apalagi 2023 sangat-sangat penting bagi kami juga bisa berinteraksi dengan masyarakat khususnya di daerah-daerah. Jadi moga-moga sebagai catatan program bimbingan teknis yang kami anggap masih banyak dibutuhkan dan kami akan dorong juga untuk diperbanyak tahun 2023 juga tetapi skema dan mekanismenya mohon diperhatikan masukan-masukan dari kami.

Kita lanjut dulu, tadi saya sudah... Pak Haeruddin. Silakan Pak Haeruddin dari Fraksi PAN. Siap-siap Pak Edward Tannur dari Fraksi PKB.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan Anggota Komisi IV yang terhormat,
Pak Menteri KKP beserta seluruh jajaran Eselon I dan mitra-mitra yang lain daripada non kementerian yang hadir yang saya hormati, dan
Seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang saya hormati saya cintai,

Pak Menteri mungkin kami sampaikan catatan-catatan kami. Pertama, kami tentu mendukung proyeksi 2023. Mudah-mudahan 2024 naik lagi jadi kemampuan anggaran kita makin naik, mudah-mudahan koreksi ke depan itu makin pembesaran ruang program yang lebih strategis untuk pelayanan kita juga lebih fokus lebih *ter-cover* semuanya. Walaupun hari ini kita apa... kita berjuang pelan-pelan karena ini akibat dari *the right man on the right job ya the right place*. Jadi orang yang memang tidak memahami penganggaran lantas jadi menteri jadi kesusahan kita ini. SILPA besar itu dianggap sukses kan luar biasa, 11 triliun jadi 6 triliun itu jadi hebat. Masa' begitu cara mikirnya. *Nah*, Pak Menteri hari ini mudah-mudahan namanya Sakti itu terus mengemban kesaktian yang lebih tinggi lagi di KKP ini. Amin Pak Menteri. Kan kita tidak tahu takdir hidup besok apa, dapat wahyu dapat wangsit nanti, Pak, Pak Sakti ini.

Yang kedua, kita ingin sampaikan catatan itu ini proyeksi program 2023 sudah terbatas anggaran kita sudah gagal proses pembangunan kita. *Nah*, ini yang ke Pak Dirjen Tangkap ya. Ini kan awal gagal awal gagal perencanaan, ini konsultan-konsultan yang bermasalah butuh dievaluasi, gagal membangun itu gagal merencanakan. Masa' membuat sebuah proses pembangunan pemecah gelombang, mana akhirnya yang tadinya ingin memudahkan nelayan bisa mendarat dengan baik dengan tenang airnya banyak penuh begitu ternyata jadi kolam pasir. Jadi kan gagal perencanaan kan, berapa mungkin puluh-puluh miliar sayang duit kita KKP. Sudah kita terbatas, sudah tidak efektif proses pembangunannya karena gagal cara merancang pembangunan. Jadi

konsultan-konsultan pendamping kita butuh dievaluasi dengan baik. Sayanglah uang-uang kita ini.

Yang ketiga Pak Menteri, kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Salim Fakhry. Kita kan kalau Bimtek 50 orang gitu ya, yang datang dari KKP banyakan, dari kita staf cuma 3 orang 5 orang atau 6 orang dan kan kemitraan itu harus dibangun ke depan itu proyeksi kita itu cerdaskan nelayan kita. Kan tidak mungkin 1-1, semakin banyak mereka berkomunikasi dengan dunia *knowledge*-nya, itu meningkatkan kemampuannya. Kesalahan kita kan dari awal kita sudah dipahami, *setting* pembangunan negara kita adalah negara kita itu adalah terlalu pada tingkat yang bersifat matrealistik, pembangunan secara fisik, sementara pembangunan orangnya kenapa dibiarkan. Saya ingin sampaikan begini, dari peradaban Atlantis sampai sekarang bangsa kita punya kecerdasan keunggulan di peradaban dunia. Sebagai contoh sisanya, hari ini kalau ada apa olimpiade matematika dan ilmu fisika, anak-anak kita selalu menang dari tahun 67 artinya secara sejahtera secara *trust* ... (*suara tidak jelas*) secara genetika anak-anak kita itu punya warisan kecerdasan yang hebat karena kita maritim bisa jadi, tapi kenapa setelah dewasanya, kurang kekuatannya ini *knowledge* maksudnya, kebutuhan itu *knowledge*. Jadi nelayan kita itu bisa cerdas kalau kita didik dengan baik itu. Jangan dianggap karena kita adalah dari Komisi IV mendorong Bimtek-bimtek karena ada ruang ada ruang keuntungan yang kita ketemu banyak orang tapi bukan hanya itu. Justru yang terpenting adalah mencerdaskan nelayan-nelayan kita. Kita itu tidak mungkin membiayai dari A sampai Z pada setiap pribadi nelayan agar naik nilai tukar nelayan, enggak mungkin kita modalkan, *kan* stimulus paling mungkin kita itu tapi yang paling mungkin kita dorong yang lebih masuk adalah bagaimana mereka punya kecerdasan tersendiri, punya keunggulan secara sumber daya, *knowledge*-nya dibangun. *Kan* kata orang *knowledge*, *skill*, *attitude*. Bagaimana dibangun tiga-tiganya, kan kalau enggak nelayan kita jadi buruh terus seperti ini.

Ini yang terpenting catatan-catatan dari kami. Kenapa kami bicara tentang lebih humanis karena kami adalah matahari. Kami ini bangsa surya, tanpa matahari tidak ada kehidupan, Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Semoga Kang Haerudin terpilih lagi tahun 2024.

Berikut Pak Edward Tannur. Kami persilakan Pak Edward. Siap-siap Pak Suhardi Duka dari Fraksi Partai Demokrat.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Selamat pagi, Pak ini semua siang jam 12.00 WIB,
Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV baik yang ada secara virtual
maupun yang fisik,

Yang saya hormati Bapak Menteri KKP beserta jajarannya singkatnya hadirin
sekalian yang berkesempatan hadir dalam ruangan ini,

Jadi dalam pembahasan hari ini, saya kira sudah mengerucut ya. Kita bicara tidak usah bahas dari bawah lagi, kita ambil di pucuknya saja karena anggaran pun sudah ditetapkan. Kita bolak-balik, bolak-balik juga enggak bisa ubah lagi itu anggaran. Jadi ini *action*-nya saja, kita bicara *action*-nya saja. Memang, kami perlu saya sampaikan dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa bahwa kita sangat prihatin ya, pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena kita sudah berupaya dan berusaha mengoreksi program-program dari KKP tapi *toh* masih belum bisa dipahami oleh pengambil-pengambil keputusan, khususnya dari segi anggaran karena memang sangat sulit laut begini luas diawasi dengan dana yang begitu kecil ya pasti ada yang lolos dan tidak maksimal yang kita capai. Walaupun programnya sudah bagus tapi masih dirasakan kurang karena anggarannya tidak mencukupi.

Jadi program yang saya lihat dari KKP ini yang lebih banyak menjurus pada peningkatan SDM/Sumber Daya Manusia, saya setuju itu. Memang kalau orang ...(*suara tidak jelas*) disuruh kerja yang besar-besar biar dananya besar juga percuma, hasilnya akan minimal. Jadi kita sepakat dengan Pak Menteri dan jajarannya, peningkatan SDM menduduki porsi yang paling pertama ya karena kita kaya akan sumber daya alam. Cuma itu yang disayangkan itu mau peningkatan SDM, dananya juga harus berimbang. Kalau dananya tidak berimbang, maka pusing juga orang yang melakukan Bimtek. Jadi kalau bisa atau sebaiknya anggaran yang diberikan itu betul-betul dikalkulasi secara baik. Jangan sampai kita yang anggotanya yang pusing karena terjadi keluhan-keluhan dari masyarakat juga dari TA-TA kami juga karena mereka selalu membandingkan dalam satu Bimtek dengan kementerian yang lain. Khusus KKP, anggaran untuk bimteknya terlalu di bawah membuat mereka merasa prihatin ini, salah kelola juga kita terakhir bukan hasil yang kita dapat positif malah jadi pembicaraan masyarakat atau peserta Bimtek.

Ini harus kita perbaiki, Pak Menteri mungkin jajarannya yang bagian sumber daya manusia. Jadi kita mau bahwa Bimtek atau ilmu atau kesadaran yang kita terapkan kepada masyarakat ini betul-betul dia harus memahami dan dengan senang hati. Kalau hanya karena terpaksa, kita Bimtek 10 kali, sama saja kalau orang yang memberikan fasilitas cukup satu kali saja dia senang sekali, artinya dia paham betul dan sadar betul. Itu khusus dari kita peningkatan sumber daya manusia lewat Bimtek.

Dan juga satu, satu kendala lagi kami mohon agar bantuan-bantuan aspirasi kalau bisa tolong dipercepat karena ini sudah masuk, sudah mau masuk bulan Oktober apalagi bantuan dana aspirasi ini sangat dinantikan oleh masyarakat di pedesaan di pelosok-pelosok karena mereka ini sekarang ini, ya mereka tidak bisa bekerja baik dan tidak bisa bekerja *perform* betul-betul

karena duit enggak ada karena kemampuan mereka rendah, maka itu bantuan ini diciptakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berusaha. Kalau bantuan yang sudah ditetapkan ini bertele-tele atau masih tertunda-tunda kasihan. Nanti sasaran dari balai bantuan ini tidak mencapai maksimal. Jadi hanya sebatas ya kalau mereka sering katakan bahwa ini serius apa enggak ini, acuh tak acuh seperti tahun 2001 bantuan bibit yang gagal. Tahun 2022 juga mungkin di tempat lain saya tidak tahu ya tapi di tempat saya mengenai bibit-bibit ikan ini masih belum turun. Jadi jangan sampai kita terlambat lagi agar dipercepat saja. Mungkin ada kendala apa coba kita diskusikan, kendalanya ada di mana? sehingga kita bisa mendapat jalan keluarnya. Tujuan inti daripada bantuan ini artinya menolong, memberikan peluang kepada masyarakat di desa untuk berusaha menciptakan lapangan kerja tapi kalau bantuan saja mau turun susah ya, coret saja terus kasih bantuan daripada mereka mengharapkan sesuatu yang tidak harus tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Kalau tidak susah ini, tiap tahun kita menganggarkan bantuan terus tapi selalu terjadi hal-hal yang seperti saya bilang keterlambatan, bibit yang kurang *fix* betul-betul bibit-bibit itu dan lain-lain sebagainya.

Berikutnya lagi dengan adanya kenaikan BBM ini ,sebenarnya sudah sangat membebani masyarakat-masyarakat di pedesaan karena semuanya semua kegiatan, semua bahan-bahan sudah naik harga semua. Jadi ini, mungkin perlu dipikirkan lagi oleh KKP mengenai anggaran yang dianggarkan ini betul-betul harus sudah diperhitungkan terhadap kenaikan BBM. Kalau tidak, maka akan menjadi beban dan menjadi keragu-raguan kepada masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan.

Mengenai bioflok, saya kira hampir 100% itu kolam *eh* apa kolam-kolam bioflok sudah jadi, cuma pengisian bibit ikannya yang belum maksimal. Ada yang sudah isi, ada yang belum. Jadi tolong dipercepat sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lebih cepat lagi.

Mengenai peningkatan produksi garam, saya kira memang kita masih impor garam tapi kalau program dari KKP untuk meningkatkan produksi garam, kita sangat mendukung dan memberikan apresiasi bahwa garam ini salah satu kebutuhan pokok oleh masyarakat. Jadi program-program yang saya lihat ada produksi garam dan lain-lainnya, saya sangat senang juga.

Satu lagi ada Program Gemar Ikan yang tetap dipertahankan dan diperbanyak itu sangat baik karena slogan KKP itu adalah "*makan ikan sehat, makan ikan kuat, makan ikan cerdas*". Itu memang betul, saya sangat setuju itu jadi baik.

Dan juga mengenai saya lihat peralatan-peralatan berat yang mau di saya lihat ada 60 ... (*suara tidak jelas*) saya senang bukan karena saya orang proyek tapi memang untuk meningkatkan produktivitas, fasilitas juga harus tersedia. Kalau fasilitas tidak tersedia sama saja kita mengkhayal.

Jadi bagus itu programnya jadi saya memberikan apresiasi untuk perikanan budidaya karena kita betul-betul harus melakukan perubahan cara

kerja. Kalau cara kerja ini tidak diubah, kita tetap terus monoton-monoton terus, akhirnya ke depannya kita tidak bisa bersaing karena produksinya mahal dan lain-lain sebagainya. Jadi jalan pikirannya benar, cuma *action*-nya yang masih belum benar, terlambat. Ini yang saya selalu tekankan. Programnya semua bagus, semua berpihak kepada rakyat kecil, cuma ya salah satunya keterbatasan anggaran. Yang kedua itu *action*, sudah *action* belum tentu efektif dan efisien. Jadi kita harus cepat *action*-nya kita bisa melakukan koreksi terhadap apa yang kita lakukan ini apakah bermanfaat bagi masyarakat atau sudah mencapai target atau belum.

Ini sebenarnya bahasa-bahasanya sederhana dan saya kira Pak Menteri juga dari orang bisnis, lebih cepat lebih baik. Jangan sampai kita ketinggalan, harusnya untung Rp10,00 jadinya rugi Rp2,00 nanti. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan dan mengenai yang lain-lain saya kira teman-teman sudah menyampaikan, saya sentil yang sederhana-sederhana saja dan jangan lupa kita bantuan alat tangkap untuk nelayan-nelayan di pesisir itu tetap kita masih komitmen kah Pak Zaini? Masih komitmen? ada bantuan untuk nelayan-nelayan miskin? Budidaya *eh* apa Tangkap? ketinting kita masih boleh dapatkan Pak Zaini ada *toh* programnya? ya. Terima kasih Pak Zaini karena ini adalah harapan yang tertunda, tahun lalu kita tertunda, mudah-mudahan tahun depan tahun ini tertunda, mudah-mudahan tahun depan bisa terealisasi.

Terima kasih banyak, Pimpinan hanya ini yang perlu saya ingatkan dan saya sampaikan saja. Terima kasih hanya ini ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Edward.

Berikutnya, kami persilakan yang terhormat Pak Suhardi Duka dari Fraksi Partai Demokrat dan siap-siap Pak Ansi Lema. Silakan Pak Suhardi.

F-P.DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh dan selamat siang,

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri, para pejabat Eselon I dan para Dirut,

Pada Raker yang lalu, saya menyampaikan penolakan terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh KKP, tidak lain adalah saya ingin mengajak mari kita merubah cara pandang kita melihat persoalan-persoalan yang dihadapi nelayan kita. Kenapa? karena saya melihat bahwa persoalan utama, nelayan kita memang belum sejahtera. Bahkan, Pak Menteri mengatakan 107 pun tidak sejahtera. Nanti 120 kira-kira baru masuk dalam kategori sejahtera dan ini kita harus menjadi tanggung jawab bersama untuk bagaimana mengangkat nelayan itu pada tingkat sejahtera.

Kemudian yang kita sering alami adalah kita sering terlambat dalam merespons setiap persoalan, utamanya bagi nelayan kita. Katakanlah

contohnya seperti kenaikan BBM, kemudian kesulitan nelayan mengambil bahan bakar di SPBU karena begitu ketatnya pengawasan. Ini sering kita tidak respons dengan baik, kita biarkan. Akibatnya, ya nelayan yang seharusnya melaut menjadi tidak melaut. Kenapa kita tidak lakukan apa namanya memberikan tangki-tangki SPBU apa SPBN kepada pusat-pusat nelayan kita untuk mengatasi persoalan ini.

Yang berikutnya, kita juga sering temukan di lapangan bahwa hasil nelayan yang berlebih sering busuk karena tidak tersedianya atau tidak adanya solusi yang dibuat oleh Pemerintah. Ini juga yang menjadi persoalan kita selalu kita hadapi tiap tahun yang tidak bisa kita atasi. Kita terpaku dengan rutinitas, apa yang kita kerjakan tahun lalu kita kerjakan lagi tahun ini dan seterusnya, tidak mampu kita melakukan perubahan. Katakanlah bagi-bagi pancing dengan tasi nomor 30 per 100 m, bagi nelayan apa manfaatnya? ya dan ini menjadi program yang terus-menerus tanpa dievaluasi, ya semua barangkali. Di daerah butuh rumpon yang mereka bisa secara berkelompok untuk mengelola, tidak pernah direspons jadi antara apa yang diberi dengan yang dibutuhkan kadangkala timpang, tidak mampu kita menyesuaikan dengan itu. Itu yang selalu saya minta kepada kita semua. Kalau saya sementara lagi tidak haus kemudian dikasih air, mungkin tingkat kebutuhan saya dan terima kasih saya kurang karena saya tidak haus tapi dikasih air, tapi kalau saya lagi haus dikasih air walaupun hanya seteguk tapi sangat bermanfaat bagi saya. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri terhadap program-program yang kita hadapi dan tidak ada niat kita untuk supaya selalu punya kita ini... Saya tahu Pak Menteri punya niat yang tulus, punya niat yang baik dan seluruh pejabat yang ada kami pun di sini sama bagaimana solusinya.

Dengan demikian, ke depan-ke depan saya ingin memberikan saran pertimbangan kepada kita semua. Mari kita saling mendengar. Kami bersuara di Komisi IV itu adalah suara rakyat. Tidak perlu kita saling menang-menangan ya, tidak ingin mengubah program dan lain sebagainya. Mari kita saling mendengarkan, saling isi mengisi karena mungkin ada yang kami sampaikan itu juga benar, itu di aplikasi.

Saya kira demikian. Marilah kita dengan 6,7 triliun ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh KKP bersama dengan nelayan Indonesia untuk kesejahteraan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Utamanya Pak Salim tadi, saya juga memberikan dukungan karena memang kita rasakan semua pelaksanaan Bimtek itu berbeda dengan kementerian yang lain ya. Kita ingin KKP lebih bagus lah daripada kementerian yang lain dalam pelaksanaan bimtek.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,
Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi.

Berikutnya Pak Ansi Lema, silakan Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Siap-siap Bu Yessy Melania.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera buat kita semua,

Pak Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen yang hadir dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pak Menteri kalau bicara soal perikanan dan kelautan terlebih soal perikanan tangkap ini terus terang saya kerap kali terharu, betapa murah kasih Tuhan buat republik ini. Kekayaan yang Tuhan kasih ke negeri kita ini melimpah ruah. Inilah sektor yang Tuhan pelihara, kita tidak perlu tanam, kita tidak perlu jaga, ikan tumbuh sendiri, berkembang biak sendiri, kita tinggal tangkap. Idealnya ini bisa memberikan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan buat republik ini.

Soal anggaran 6,7T, Pak, naik sekitar 600 miliar, secara pribadi saya memberi apresiasi, Pak. Semangat yang muncul di teman-teman Komisi IV ini urusan laut ini urusan sesuatu yang besar tetapi anggarannya *kok* kecil, kita prihatin tetapi jujur saya ingin katakan ke teman-teman Komisi IV ini bukan salahnya Pak Menteri atau Pak Trenggono. Beberapa waktu lalu saya buka *file*, kementerian ini pernah punya anggaran 10 triliun tetapi tiba-tiba jadi cuma 6 triliun. Ada Menteri yang mengatakan efisiensi, *self blocking* dan "pukul dada" bahwa saya melakukan penyelamatan uang negara. Kalau boleh saya tegaskan Menteri yang mengatakan demikian karena "miskin konsepsi", "miskin visi", "miskin inovasi", dan "miskin kreasi". Tidak tahu kerja karena tidak punya perencanaan, maka dampak sekarang itu adalah kepada kita. Kementerian ini anggarannya cuma sekitar 6 sampai 7 triliun, saya ingin luruskan buat republik ini, bukan efisiensi tetapi karena perencanaannya yang tidak profesional. Saya yakin betul tidak ada SID (Survei Identifikasi Desain) saat itu, survei indentifikasi *design* programnya tidak ada. *Stressing* pada saat itu kan cuma *illegal fishing*. Apakah pernah berpikir soal bagaimana membudidayakan perikanan budidaya berorientasi ekspor? Bagaimana mengoptimalkan dari perikanan tangkap dan seterusnya? karena itu terus terang, secara pribadi saya tidak bisa terlalu banyak menuntut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara pribadi, saya terima anggaran ini, Pak, tetapi terutama terkait dengan kebijakan penangkapan terukur, saya ingin proses ini berjalan secara

intelektual, Pak. Bicara perencanaan itu proses intelektual, bicara perencanaan itu kerja intelektual, kerja akademis. *Nah*, kaitan anggaran ini ada Bappenas ada Kementerian Keuangan. Kalau Menteriya tidak punya visi, bagaimana bisa mempersuasi, berargumentasi, dan mendorong sehingga kementerian ini bisa dapat anggaran yang besar. Mohon maaf, sekolah ini ternyata penting juga supaya dalam mengelola sebuah kementerian perlu ada visi, arah, dan orientasi. *Nah*, konkretnya yang ingin saya katakan Pak Menteri kalau boleh, apalagi sudah menjadi kesimpulan pada 30 Agustus 2022 dalam Raker terkait dengan kebijakan perikanan ikan terukur itu, kita buat FGD khusus mengenai ini, supaya kami Anggota DPR ini tidak hanya meraba-raba pada sisi permukaan, Pak, tidak hanya mengetahui pada sisi kulit luarnya Pak dan saya ingin proses ini betul-betul proses yang akademis, ilmiah merupakan kerja intelektual, Pak. Kami tidak setuju pun pada wilayah mana, kritik kami pun pada hal apa. Petani, mohon maaf, nelayan kecil dapat apa dan seterusnya kira-kira itu yang pertama Pak.

Yang kedua, kalau boleh di masa depan, Pak, ya mungkin lobi persuasi kepada Bappenas dan juga kepada Kementerian Keuangan itu lebih diperkuat Pak, tetapi namanya persuasi dan lobi ini dasarnya tetap substansi, tetap visi, tetap perencanaan. Saya berharap bisa kembali dari 6 atau 7 triliun ini ke-10 atau di atas ini, Pak, ya. Saya ingin menggarisbawahi republik ini jangan mencatat dari 10 turun ke 6 itu efisiensi, enggak, itu miskin visi. Saya harus tegaskan soal itu.

Yang berikut Pak, mungkin karena anggaran KKP terbatas, usulan konkret kami, Pak, kalau boleh terkait dengan sektor perikanan dan kelautan ini ada sinergi dalam tanda petik “kerja keroyokan”, Pak, dengan lembaga atau instansi lain, misalnya BUMN. Mungkin BUMN perlu dikasih pencerahan bahwa CSR-CSR itu juga perlu diarahkan kepada sektor perikanan dan kelautan. Dengan demikian, kementerian ini bisa menghemat, tetapi ada kerja konkret untuk petambak garam, untuk nelayan kecil tradisional, untuk pembudidaya ikan dan seterusnya, Pak.

Nah, yang terakhir soal menu DAK Pak. Ya, kami ingin menu DAK ini betul-betul dalam kendalinya kementerian, ini masih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas itu visi, arah dan orientasi itu ada di kendalinya kementerian dalam menerjemahkan visi besar Presiden Joko Widodo. *Nah*, karena itu terus terang kalau boleh menunya juga jangan terlalu banyak, Pak. Kerap kali kita juga jadi bingung, ada yang mau ke utara, ada yang mau ke selatan. Jadi prioritas, skala prioritas dalam menu DAK ini mungkin perlu, Pak.

Terakhir, apresiasi Pak kemarin ada Bimtek saya buat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Pak, itu mama-mama senang sekali. Nama bimteknya itu adalah Pengolahan Produk Perikanan, itu yang datang 350 orang, ya akhirnya kita menombok juga Pak. Ya animonya tinggi, Pak Ansi *kok* kami enggak diajak Pak, kami enggak di... padahal, mungkin kapasitasnya cuma 200 yang datang 350 lebih, Pak. Awalnya bilang kami duduk-duduk saja ya masa duduk-duduk pulang enggak ada duit transport, itu terus terang, Pak, tapi itu oke saya berikan apresiasi.

Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Ansi.

Maaf tadi saya ada kesalahan sedikit, saya sudah kasih kesempatan ke Bu Yessy, Bang Johan, sebenarnya waktu Bang Johan tapi kalau boleh kita Bu Yessy dulu setelah itu ke Pak Johan ya. Silakan Bu Yessy Jubir dari Fraksi Nasdem, setelah itu Pak Johan Rosihan juru bicara dari Fraksi PKS.

Silakan Bu Yessy.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta Eselon I dari KKP yang saya banggakan,

Yang pertama, tentu kami sama dengan fraksi yang lain. Mau tidak mau ya tetap akan mendukung dan penggunaan anggaran 6,7T sekian itu, memang secara luas tentu belum sangat-sangat belum mampu untuk bisa mengakomodir semua kebutuhan dari persoalan di sektor kelautan dan perikanan di Republik Indonesia ini, tapi ya sekali lagi bisa tidak bisa kita harus mampu untuk memaksimalkan anggaran ini.

Dan memang beberapa catatan kami, tadi saya di jalan mencoba untuk melihat dan membandingkan antara dulu sebelum kita reses masa sidang bulan Juni atau Juli, ada komitmen beberapa yang sudah diberikan KKP kepada kita Komisi IV, dan di situ saya ya ada yang perlu diapresiasi dan ada memang yang perlu dikritisi dan dipertanyakan. Memang ini anggarannya sudah *fix*, kita tidak bisa untuk ubah-ubah lagi tapi berhak juga mungkin kami Anggota menanyakan kenapa ini berbeda, kenapa ini berubah dan lain sebagainya. Contohnya, saya melihat dan sedikit menyimpulkan bahwa memang dukungan terhadap perairan umum darat ini bisa dibilang sangat minim dan ini saya lihat juga semakin menurun setiap tahun. Contoh program yang sudah kemarin di Juni, Juli itu diberikan kepada kami, di situ ada bioflok kalau tidak salah itu 9 apa 10 unit untuk 1 Anggota tapi dikurangi menjadi 5 di bahan yang sekarang.

Kemudian juga mesin pakan, mesin pakan ini sebetulnya satu hal atas suatu bantuan yang sangat-sangat bermakna bagi masyarakat. Itu di awal kalau tidak salah saya, ada dialokasikan dua tapi di paparan bahan kali ini saya melihat itu tidak ada dan sudah hilang. *Nah*, ini pertanyaan saya. Kita tahu persoalan nelayan saat ini dan juga kita lebih spesifik lagi bicara di perairan umum darat bahwa BBM juga saat ini naik, kemudian pakan juga masih sangat-sangat mahal saat ini. Hampir kurang lebih dengan kita bicara di Kementerian

Pertanian persoalannya pupuk, kalau di KKP untuk perikanan budidaya dan budidaya terutama itu pakan. *Nah*, lagi lagi-lagi di sini pakan yang seharusnya bisa membantu para nelayan kita untuk bisa mandiri dan produktif mengolah dan memikirkan alternatif tanpa harus mengeluarkan ekonomi yang tinggi, mengeluarkan uang yang banyak untuk beli pakan tapi lagi-lagi ini di dihilangkan atau dikurangi. *Nah*, ini mohon nanti penjelasan dari Dirjen atau bagian yang berkaitan.

Kemudian, memang ada beberapa yang perlu kita apresiasi, ada penambahan-penambahan seperti *cool box*, kemudian jaring apung, kemudian juga Program Bakti Nelayan juga saya lihat ditambah dari satu itu menjadi dua titik kegiatan itu juga perlu kita apresiasi. Dan tadi juga terkait Pak siapa tadi, Pak Edward kalau tidak salah mengatakan bahwa bibit benih ikannya juga lama belum turun-turun. *Nah*, itu Pak Menteri mungkin bisa menjadi perhatian juga serius dan fokus bahwa bantuan benih dan calon indukan dirasa terutama di Dapil kami, itu dirasa memang sangat-sangat tidak terlalu bermanfaat dan tidak terserap dengan maksimal sampai akhir. Bahkan, dari 2020 sampai saat ini untuk bantuan calon indukan, saya tidak pernah berhasil untuk bisa akses.

Sekali lagi saya sampaikan di sini bukan masalahnya di KKP maksudnya di sini bukan, bukan juga di pengusul di dinas bukan, di kelompok juga bukan, di kami juga bukan tapi ini enggak tahu ini harus kita cari. Apa karena UPT-nya tidak maksimal, kemudian BBI-nya juga tidak aktif. Jadi bantuan benih dan calon indukannya tidak maksimal sama sekali dan pernah juga kemarin saya mendorong kalau memang ini kira-kira percuma bantuan ini tadi kata Pak Edward, dialokasikan saja ke yang lain. Misalnya di daerah kita produktifnya pakan, mesin pakan dikasih alokasikan saja ke situ ditukar daripada dipaksa *toh* juga enggak terserap sampai nanti. Ini indukan saya boleh cek di Kalbar Dapil II itu tidak pernah bisa terserap karena tidak ada yang mampu Balai Benihnya atau UPT-nya menyiapkan. Ini memang jadi persoalan dan Pak Menteri, Pak Sekjen juga setiap kali rapat mengatakan persoalan UPT ini memang di berbagai wilayah hampir kurang lebih. Jadi kita setiap provinsi belum punya kemandirian untuk bisa suplai calon benih ataupun indukan ikan itu sendiri.

Kemudian terkait Bimtek. Saya setuju dengan teman-teman yang lain memang KKP ini agak unik dan berbeda sendiri dibanding kementerian yang lain. Tadi Kakak Ansi mengatakan budaya nombok itu sering. Saya juga begitu Pak, tapi bukan untuk minta perlindungan atau pembenaran, tidak, tapi ini hanya untuk *sharing*. Kemarin juga ada Bimtek Pokmaswas itu kalau tidak salah satu, satu peserta itu hanya sekian ratus ribu. *Nah*, di sana untuk Pokmaswas itu sudah tidak lagi relevan nilai Rp150.000,- untuk transport mereka karena mereka itu akomodasinya sudah jalur sungai semua apalagi Kalimantan sungainya panjang dan itu kalau mau jujur transportnya mereka satu juta satu orang, baru mereka mau pergi. Kalau enggak segitu, mereka enggak akan datang. *Nah*, itu harus ada apa ya kepedulian dan teman-teman di yang harusnya turun ke bawah untuk mengontrol monitoring yang ikut-ikutan Bimtek ini, harusnya tahu dan peka akan persoalan itu dan itu bisa didorong disampaikan untuk dievaluasi Bimtek-bimtek ini. Dan kemudian juga tadi keluhan dari teman-teman Anggota bahwa TA-nya juga mengeluhkan yang

sama dan itu juga terjadi saya pikir di setiap wilayah. Mungkin ya anggarannya 160-an juta yang betul-betul bisa terpakai itu hanya 100-an misalnya, *nah* itu salah satu karena enggak tahu bocornya di mana apa lain sebagainya.

Kemudian, kami juga mendorong tentu meskipun dengan keterbatasan anggaran dan kebijakan yang kita punya, tentu membicarakan masalah sektor kelautan dan perikanan ini juga tidak berhenti rasanya sampai di sini. Kami juga sepakat dari teman-teman dari Golkar mengusulkan ada FGD juga mungkin di setiap Eselon I, itu bisa mendorong apalagi kita cita-citanya mau mewujudkan ekonomi biru.

Kemudian juga terkait program perikanan tangkap, perikanan terukur dan lain sebagainya, itu masih banyak yang perlu kita diskusikan di luar forum rapat-rapat seperti ini di DPR. *Nah*, mungkin dengan situasi yang lebih santai itu bisa tadi Pak Suhardi Duka mengatakan bisa lebih saling mendengarkan. Jadi supaya yang kita sampaikan juga tidak hanya angin lalu tapi betul-betul didengar karena suara kita juga sekali lagi merupakan suara dari masyarakat yang kita wakili di setiap daerah masing-masing yang tentu punya persoalan, punya problematikanya masing-masing di sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

Mungkin itu saja Pak Pimpinan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian kita bersama.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Yessy.

Silakan Pak Johan Rosihan dari PKS.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Pertama, sesuai dengan agenda pokok *Insyah Allah*, kami dari PKS menyetujui anggaran yang sudah dibahas ini dari pagu indikatif 6,1 triliun. Kemudian berubah dan bertambah menjadi 6,7 triliun untuk KKP ini. Mudah-mudahan kegiatan ini persetujuan ini bisa membuat kinerja dari Kementerian Kelautan Perikanan bisa semakin baik, itu yang pertama.

Yang kedua, apa yang ingin dikerjakan oleh KKP ke depan ini *kan* bisa kita ukur dari IKU yang sudah dicantumkan, diberikan kepada kita. Ada pertumbuhan PDB perikanan 4 sampai 6%, produksi perikanan ada di sini ekspor perikanan, angka konsumsi ikan, nilai tukar nelayan sudah bisa kita

baca di sini. *Nah*, terkait dengan IKU-IKU yang diajukan ini, Pak, kemarin, Fraksi PKS ketika Raker sebelumnya dalam pembahasan anggaran ini bertanya soal apa rendahnya anggaran untuk peningkatan daya saing produk perikanan kita dan itu memang tampak ketika kita lihat IKU-nya itu ekspor hasil perikanan kita itu ditargetkan hanya 7,66 miliar. Saya tadi buka-buka situs KKP, ternyata per semester I tahun 2022 ini kita sudah pada angka 3,06 dengan, per Juni sudah pada nilai 7,86 triliun. *Nah*, kurang, kurang “nendang” ini, Pak Menteri, menurut saya ya. Saya coba-coba kalau misalnya kita coba tingkatkan nilai ekspor kita, kita kali tiga itu sudah pada angka 1,36 triliun pada karena capaian kita sekarang sudah, sudah 7 koma apa 7,6 \$3,05 miliar pada semester I, ini di sini cuma 7, kalau misalnya dikali tiga itu bisa 9, Pak, ada peningkatan 2 triliun misalnya begitu. *Nah*, tapi karena kurangnya anggaran, itu yang kedua.

Yang berikutnya, Pak, tetap saya mau bertanya tentang soal dampak BBM ini, Pak, ya. Kemarin kita bertanya, saya meminta KKP untuk menghitung betul ini kira-kira dampak ya. Ada saya catat di sini bahwa dalam rapat kemarin disepakati bahwa KKP diminta bekerjasama secara serius dengan Pertamina dan menyiapkan BBM untuk nelayan. Tolong ceritakan kepada kami komitmennya, bagaimana tindak lanjut yang sudah dilakukan.

Yang berikutnya juga bahwa KKP bekerjasama dengan ESDM, Kementerian BUMN agar menyiapkan SPBU nelayan ya karena persoalan kita kan pada tadi banyak disampaikan tentang rumitnya para nelayan kita untuk mendapatkan BBM itu di tempat-tempat SPBU umum itu.

Terus yang berikutnya, Pak, ada program, ada wacana Pemerintah itu mengalokasikan 2% dari total transfer dana Pemerintah Pusat ke daerah untuk ojek *online* dan nelayan. Saya ingin tanya itu sudah bagaimana bentuk realisasinya apakah memang sudah terealisasi atau ini masih sebatas wacana saja ya biar karena saya sudah lihat gambaran-gambarnya sudah ada *flyer-flyer*-nya, Pak. Ada dana ada rencana Pemerintah 2%, Pak, dari total transfer dana ke daerah itu untuk ojol dan nelayan. *Nah*, bagaimana pelaksanaannya di bawah. Kalau KKP sendiri tidak mengerti ini kan berarti ini sekedar cerita saja kan begitu dia, Pak, ya.

Yang berikutnya saya ingin tanya dari 6,7 ini, berapa diperuntukkan untuk ketahanan pangan Pak ya? Kenapa saya tanya ini Pak, saya saya mengikuti betul pembicaranya Bu Sri Mulyani ini ketika penyampaian di pengantar APBN kemarin itu bahwa sudah kami siapkan dana 95 triliun untuk ketahanan pangan. Ya, Pak, saya jumlahkan keseluruhan anggaran ini Pak Menteri KKP, Menteri Perikanan, Menteri Kehutanan itu ternyata cuma 70an triliun ya di situ sudah termasuk pegawai, Pak. *Nah*, karenanya tolong jelaskan kepada kami dari 6,7 ini yang diperuntukkan untuk ketahanan pangan sendiri itu klasifikasinya apa berapa jumlahnya ya biar kita bisa membantah begitu bahwa pidato Sri Mulyani itu hanya cerita saja.

Nah, terakhir mungkin ini, Pak, soal Pak soal apa namanya bukan terakhir ya, menegaskan Yessy tadi soal pakan. Bapak selalu bercerita bahwa bahan baku pakan kita itu berupa tepung ikan itu 90%-nya itu masih bersumber

dari impor ya, tetapi di dalam perencanaan ini kita tidak melihat program misalnya Bapak ingin membuat program bagaimana cara membuat tepung ikan berkualitas misalnya begitu, itu kritik saya.

Yang terakhir Pak, saya *concern* semua masukkan teman-teman tadi itu sudah mewakili sebenarnya dari apa yang ingin Bapak sampaikan pada ketika Bapak pertama jadi menteri dengan... dengan apa dengan 3 program unggulan itu ya. Saya tetap menagih itu, Pak, ya. Contoh pada Raker sebelumnya, pada Raker sebelumnya saya sudah minta tentang kampung nelayan maju misalnya, tolong dibuatkan profilnya, Pak. Sekarang sudah dijawab secara tertulis pertanyaan saya tapi itu masih normatif. Saya ingin dalam bentuk gambar profil, contoh misalnya kampung nelayan maju, sebelumnya begini, sesudah dapat program nelayan kampung nelayan maju ini bagaimana profilnya. Sebelumnya angka kemiskinannya sekian ya kan, pendapatan nelayannya sekian dibuatlah semacam legenda di sampingnya itu biar kita tahu bahwa memang kampung nelayan maju ini ada progresnya begitu sehingga ketika kita ingin menambah pun kita tidak ragu-ragu untuk menambah karena memang ada progres.

Nah, saya baru dijawab itu dengan... dengan apa namanya normatif sekali bahwa kita akan begini kita akan begini-begini sudah. Saya butuh gambar ya karena pertanyaan itu muncul ketika Pak Sekjen kemarin menampilkan foto Muara apa Muara Baru. *Oh* sebelumnya begini, setelah kita tangani begini. *Nah*, kampung nelayan maju kita bagaimana begitu biar kita semua melihat bahwa program kampung nelayan maju program unggulannya Pak Menteri itu betul-betul sakti kan begitu dia, ada perkembangannya.

Jadi mungkin itu Pak Ketua yang kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Johan.

Saya rasa semua fraksi sudah menyampaikan ya catatan-catatannya e.. terkait rencana kerja KKP tahun 2023. Saya dalam kesempatan ini mungkin juga menambahkan 1, 2 hal. Pertama-tama mengenai pagu anggaran yang telah disetujui dan akan kita sepakati bersama ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh Saudara saya, Pak Ansi Lema. Kita bisa lihat dari tren bahwa sudah mengalami kenaikan, meskipun semua yang ada di ruangan ini sependapat bahwa ini jauh dari kata cukup, apalagi potensi kelautan kita yang begitu luar biasa, tetapi saya apresiasi bahwa tren ini *it's on the right track*, artinya sudah trennya sudah ke arah yang benar. Saya apresiasi Pak Menteri selaku nahkoda dari Kementerian Kelautan Perikanan yang mampu untuk membawa kementerian ini ke arah yang benar, dari penurunan yang begitu signifikan dari tahun 2016 karena penyerapan anggaran yang begitu rendah diikuti tahun 2017 juga, sekarang menunjukkan tanda-tanda arah yang lebih baik.

Kita harap bahwa tren atau *track* pagu kenaikan anggaran ini akan terus dipertahankan, Pak Menteri dan tentunya diikuti dengan penyerapan anggaran melalui memaksimalkan potensi ekonomi perikanan yang ada, dan kami mendorong terus ya penguatan-penguatan pengembangan segala macam potensi apakah itu budidaya, lobster, kepiting, rumput laut. Saya rasa rumput laut ini kita coba tingkatkan bukan cuman kita ekspor rumput laut tetapi kita tingkatkan juga nilai tambahnya. Kita bukan cuman ekspor bahan bakunya.

Juga dari Perikanan Tangkap ya, kita akan terus berupaya memaksimalkan pasar-pasar khususnya pasar luar negeri yang mungkin berpotensi untuk menjadi destinasi dari produk-produk kelautan dan perikanan kita. Saya tahu ada beberapa negara yang kita sudah menandatangani *free trade agreement*. Ini bisa menjadi potensi pasar seperti negara seperti Swiss. Kita tahun lalu, beberapa tahun lalu sudah menandatangani FTA dan sudah diratifikasi dan permintaan akan produk-produk kelautan perikanan di situ begitu tinggi, saya rasa ini bisa menjadi kesempatan untuk kita memasuki pasar ekspor, pasar global.

Berikutnya, saya juga tadi sudah disebutkan permasalahan BBM untuk nelayan. Ya, kami terus mendorong KKP untuk kerja sama berkolaborasi dengan lembaga maupun instansi terkait seperti Pertamina untuk menyediakan menyalurkan BBM untuk para nelayan, apalagi kita sama-sama ketahui banyak sekali yang sangat-sangat membutuhkan bantuan BBM tersebut. Juga mungkin bisa dibantu dengan meningkatkan jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan basisnya koperasi.

Kemudian, saya mengingatkan Saudara Menteri Kelautan Perikanan dan khususnya Pak Dirjen Budidaya ini, untuk mempercepat pembuatan regulasi untuk pupuk bersubsidi khusus untuk pembudidaya ikan tradisional. Harapannya tahun depan ini sudah siap payung hukumnya, Pak Dirjen.

Dan terakhir saya dukung upaya KKP meningkatkan kawasan konservasi sampai 29 juta hektar dan saya ingin dalam kesempatan ini memberikan dukungan dan dorongan supaya Pak Menteri dan KKP juga mendorong upaya-upaya pengembangan potensi ekonomi biru. Saya perhatikan selama ini, Pak Menteri sudah sering menyuarakan permasalahan ini. Ya, saya ingin sebagai mitra yang baik kita dorong terus ya. Jangan lelah Pak Menteri mengingatkan dan mengupayakan ekonomi biru ini menjadi sumber potensi bagi Indonesia. Ini saya rasa ke depan bukan cuman bisa menghasilkan potensi kelautan yang *sustainable*, yang berkelanjutan, yang berkelanjutan tetapi juga bisa menjadi salah satu solusi untuk memitigasi permasalahan perubahan iklim atau *climate change* di dunia ini. Kita ketahui bersama juga Indonesia mempunyai target-target besar dalam berupaya mengurangi gas rumah kaca yang tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan yang kita telah keluarkan di forum-forum internasional. Kita sudah memiliki ambisi target-target yang harus kita capai di tahun 2029. Kita harapkan sektor kelautan bisa juga menyumbangkan potensi ini. Selama ini kami memperhatikan banyak upaya untuk menekan gas rumah kaca atau

menanggulangi *climate change* ini tapi lebih banyak dari sisi darat dari *terrestrial efforts* dari potensi-potensi darat.

Kami ingin mendorong ya tahun 2023 ini menjadi kebangkitan supaya KKP menjadi penopang, menjadi ujung tombak memerangi perubahan iklim yang bisa berdampak kepada sektor kelautan perikanan kita melalui upaya-upaya yang tepat sasaran. Saya apresiasi Pak Menteri juga selama ini saya perhatikan banyak menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk pengembangan ekonomi biru ini mohon diteruskan.

Saya rasa demikian dari saya....

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap Pak Salim.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Menyambung sedikit saja.

Pak Menteri, informasi tadi pagi dari para nelayan Natuna. PDSKP itu mengawal kapal pengawas kita menangkap satu kapal Vietnam. Ini kami ucapkan.... saya tengok Bapak Dirjen ini sudah angguk-angguk memang mantap Pak Dirjen ini karena di lapangan tadi pagi karena kunjungan kami seminggu yang lalu *kan* ini yang apakah Pak Menteri, kami atas nama kami rekan-rekan Komisi IV, 'top' PDSKP, kalau bisa tambah anggarannya, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Salim.

Kami persilakan kalau ada yang mau mendalami. Silakan.

F-P.GOLKAR (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Ketua beserta Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati dan banggakan Menteri beserta jajaran Eselon I,

Menyambung dari Pak Salim Fakhry, saya ingin menyampaikan aspirasi dari kunjungan kerja kita ke Kepri beberapa minggu lalu. Ada aspirasi, Bapak, dari Wakil Ketua HNSI, Eko Fitriandi bahwa saat ini di Kepri ini ada tiga

pelabuhan yang menunjang penangkapan ikan terukur di daerah Batam dan Natuna. *Nah*, sehingga saat ini ada keresahan dari nelayan di wilayah perairan 711 yang berasal dari Tanjung Pinang dan Karimun apabila mereka harus berangkat ke Batam atau Natuna untuk penghitungan PNBP di wilayah tersebut, sehingga dengan ini kami memohon bahwa penambahan pelabuhan dan pendampingan khususnya di Tanjung Pinang dan Karimun untuk yang mendukung penangkapan ikan terukur, karena perjalanan dari Tanjung Pinang dan Karimun ke arah Batam dan Natuna menggunakan kapal yang biasa itu butuh waktu lebih dari dua jam.

Kedua, dua pertiga wilayah Indonesia itu adalah perairan dan kami mengapresiasi kinerja KKP dalam mengawasi sumber daya kelautan dengan anggaran yang seadanya. Saya juga sependapat dengan rekan-rekan Komisi IV bahwa anggaran untuk KKP harus ditingkatkan karena berdialog lagi dengan nelayan-nelayan di daerah Kepri bahwa mereka sering kali terpaksa memutar balik kapal mereka apabila terdapat *in counter* dengan kapal-kapal dari Vietnam dan China. Kemudian juga mereka berharap ada pengawasan lebih karena apabila nanti berjalan sering kali ada ketakutan dari kelompok masyarakat bahwa nelayan izin pusat bisa masuk ke zona tradisional apabila tidak ada pengawasan yang memadai.

Mungkin sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kelebihan kekurangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Pak Ravindra Airlangga.

Saya persilakan ada dua tadi, ada yang mau, ada Pak Hermanto dulu oh Bu Endang, setelah itu Pak Hermanto, setelah itu Bu Saadiah. Pak Ansi sudah tadi. Bu Endang, silakan Bu.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota Komisi IV yang saya banggakan, khususnya Pak Menteri dan jajarannya dan juga dari Dirut-dirut yang Pak Menteri ajak untuk diskusi pada siang ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jadi Pak Menteri, saya hanya ingin tadi mengusulkan seperti yang diusulkan teman-teman yang belum diprioritaskan itu adalah lokasi-lokasi yang tidak punya laut Pak. *Nah*, di sini saya ingin tekankan bahwa ada juga beberapa potensi kita yaitu tentang *local wisdom* atau kearifan lokal, banyak sekali ikan-ikan yang bisa dijadikan agrowisata yang bisa meningkatkan tadi, Pak, nilai

tukar nelayan kita. *Nah*, jadi belum pernah ada Bimtek mengenai hal tersebut. *Nah*, mohon diprioritaskan.

Yang kedua tentang tadi, Pak, ini di perikanan air tawar juga, yaitu tentang udang. Udang yang berasal dari air tawar *nah* ini perlu juga diperhatikan Pak karena masyarakat kita sudah mulai menyenangi udang baik untuk ekspor maupun untuk konsumsi lokal tapi tadi prioritas yang diutamakan oleh kementerian belum ke sana arahnya.

Yang ketiga tentang garam, Pak. Garam ini sebetulnya bisa dibuat juga untuk dalam kosmetik, Pak. Saya sudah berulang-ulang kali mengusulkan karena ada beberapa koperasi garam kita yang akhirnya stagnan, Pak, karena nilai akhirnya itu tidak bisa dijadikan menambah, menambah kesejahteraan. *Nah*, padahal di lain pihak garam kosmetik ini sangat diperlukan. *Nah*, jadi mohon Bapak Dirut Garam ini bisa diprioritaskan khususnya di daerah kami di Agrabinta, Pak.

Nah, juga yang terakhir tentang proporsi anggaran yang ada. Jadi Pak Menteri sudah bagus sekali, kalau bisa Pak tadi ada semacam analisa diagnostik *before and after* karena ini sangat penting sekali, apalagi Bapak sebagai pengusaha tentunya masyarakat kita ini ingin kehadiran dari KKP ini justru menambah kesejahteraan mereka. Di konsumsi akhir, Pak, yaitu banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan saya sudah beberapa kali mengajukan proposal yang dihasilkan oleh beberapa perguruan tinggi, Pak, untuk mengelola hasil akhir yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat, sisa-sisa dari pengolahan ikan dan udang itu bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya berupa terasi saja, Pak, karena terasi itu kan selalu konotasinya itu terlalu apa namanya ke arah domestik begitu. *Nah*, ini bisa diekspor ke luar negeri, Pak. *Nah*, saya sudah beberapa kali mengajukan proposal yang dihasilkan oleh beberapa perguruan tinggi tapi belum pernah ada tindak lanjut. *Nah*, mudah-mudahan Pak Dirjen yang baru ini bisa memanggil teman-teman di perguruan tinggi karena mereka juga *idle* ini Pak, kalau hasil-hasil penelitiannya tidak dipergunakan.

Nah, yang berikutnya adalah tadi, Pak, untuk lahan-lahan yang tidak bisa dikembangkan seperti Bu Yessy, kemukakan untuk perikanan laut, *nah* khususnya di Kota Bogor ini, Pak, banyak sekali ekspor ikan hias yang terbengkalai Pak. *Nah*, ini mohon ada perhatian khusus dan juga tempatnya, Pak, lokasinya itu tidak diperhatikan. Jadi kalau Bapak jalan-jalan ke Kota Bogor di empang itu, Pak, banyak sekali ikan-ikan hias yang bagus yang dijual tapi tidak terlindungi jadi sangat panas, Pak, daerahnya itu di pinggir jalan dan lagi Perda dari pemerintah setempat juga tidak melindungi. Jadi mohon, Pak Menteri dan jajarannya bisa memperhatikan hal tersebut.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Endang.

Berikutnya, Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati, Anggota Komisi IV DPR RI,
Menteri Kelautan Perikanan bersama jajaran yang saya hormati,

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa postur daripada APBN di KKP ini, itu alokasi untuk program yang berbasis masyarakat itu hanya 7,24%. Kalau kita membaca postur seperti ini maka sesungguhnya alokasi anggaran program yang berbasis dan berpihak kepada nelayan atau pembudidaya itu sangat rendah sekali. Artinya, kita bisa bertanya seperti apa *sih* Pemerintah ini untuk bisa memajukan pertumbuhan sektor ekonomi nelayan dan pembudidaya ini di masyarakat. Jadi, 7,24% 7,24% ini ya memang sangat rendah kalau menurut saya. Namun, kami memahami bahwa situasi keadaan dan ekonomi sekarang ini sehingga berdampak pada anggaran untuk KKP ini walaupun mengalami kenaikan tapi kenaikannya itu tidak cukup signifikan untuk mendorong tingkat pertumbuhan perbaikan ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.

Nah, tentu ini menjadi catatan bagi saya bahwa keberpihakan kita, negara kepada nelayan dan pembudidaya ikan ini, ini sangat penting karena kita menghadapi situasi kalau di dalam pembahasan-pembahasan Kementerian Pertanian itu, ada semacam krisis pangan ke depan. Saya pikir untuk kompensasi meringankan program-program untuk menghadapi krisis pangan ini perlu juga ditopang oleh program dari Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga kita bisa bersinergi untuk mengatasi situasi dan krisis pangan seperti ini dan juga Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga Bu Menteri Keuangan terus mengingatkan kita, mengingatkan negara, bangsa dan komponen menteri dan segala macamnya untuk supaya waspada terhadap datangnya krisis pangan, krisis perubahan iklim yang berdampak kepada sektor perekonomian dan dalam hal ini juga berdampak kepada sektor kelautan perikanan. *Nah*, saya pikir postur semacam ini menurut saya walaupun ini sudah ditetapkan ya kan ke depannya saya minta ini mohon diperbaiki begitu, mohon diperbesar proporsionalitasnya, sehingga keberpihakan kita kepada nelayan itu betul-betul bermaksud untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. Itu menurut saya ini sangat penting.

Kemudian yang kedua, saya juga berharap dari agenda-agenda dan program kerja kelautan ini, juga memiliki kearifan lokal terhadap pembudidaya-pembudidaya ikan yang bersifat kearifan lokal. Misalnya, di Sumatera Barat itu ada ikan bilih, kemudian juga ada ikan larangan, setidaknya di Sumatera Barat ini ada dua jenis pembudidaya ikan di masyarakat yang ada di Sumatera Barat. Mungkin di daerah lain pun juga ada, bukan hanya di Sumatera Barat.

Nah, menurut saya ini kementerian perlu mengidentifikasi sehingga bisa mengklasifikasi ini budidaya ikan yang bersifat kearifan lokal ini perlu juga ditopang dengan anggaran, sehingga mereka juga bisa hidup tumbuh berkembang karena memang ada juga tipe masyarakat di pedesaan atau di perkampungan itu memang mengharapkan hasil ekonominya dari situ.

Ini kemudian juga saya minta juga mohon supaya *restocking* untuk ikan bilih di Danau Sangkarak dan juga terkait dengan Danau Maninjau yang sering terjadi kematian ikan yang ratusan ekor di situ, itu mohon perbaiki lingkungannya Pak Menteri dan kita pernah bersama berdua di sana sambil ngopi sambil memandang Danau Maninjau, begitu indah tapi ada aspirasi masyarakat di situ. *Nah*, ini masih juga masyarakat di sana menghendaki program-program ini bisa direalisasikan.

Kemudian yang terakhir Pak Ketua, terkait dengan soal pakan ikan. Memang kami atau masyarakat pun juga menyampaikan terima kasih atas sebagai bantuan tetapi mereka akan lebih senang kalau bantuan itu adalah pakannya, pakan ikan terapung dan kalau juga permohonan mereka ini itu adalah alat pengolah pakan ikan itu juga alat pengolah pakan ikannya terapung juga, sebab ada beberapa alokasi di Sumatera Barat itu banyak CPCL itu enggak mau menerima mesin pakan ikan yang tenggelam. *Nah*, sehingga pihak dinas pun juga melakukan CPCL itu mengalami kesulitan.

Demikian Pak Ketua, Pak Menteri.

*“Makan durian bersama kekasih,
cukup sekian terima kasih”.*

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hermanto.

Bu Saadiah, silakan Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.. MP ID.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,*

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri dan para Dirjen serta jajaran yang saya hormati,

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, agenda Raker kita di rapat yang kemarin paska pembahasan Banggar untuk rapat hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Johan Rosihan bahwa ada mengalami kenaikan kurang lebih Rp660,00, kami ingin mendapatkan penjelasan soal berapa alokasi untuk dana ketahanan pangan yang sudah disampaikan.

Kemudian juga, saya *mention* beberapa hal terkait dengan, beberapa waktu lalu saya melihat di media sosial milik KKP itu mengenai polisi khusus pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pak Menteri, kami minta ada gambarnya peran polisi khusus ini untuk apa? begitu. Bagaimana keberadaan mereka di fungsi mereka untuk pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, apakah hubungannya juga dengan apa namanya zona penangkapan ikan terukur atau pengawasan yang diperluas? Saya minta ada penjelasannya.

Kemudian juga, di beberapa kali pertemuan kita ketika kami sampaikan terkait dengan sektor budidaya, salah satu kendala yang sering disampaikan adalah tentang pakannya dan itu selalu menjadi keluhan di masyarakat di dalam Bimtek yang kami gelar kemarin juga banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pakan begitu. Mau pakan apa namanya pakan beli apa pakan yang dijual di toko itu harganya mahal, dan olehnya itu perlu ada kreativitas ataupun inovasi khusus agar masyarakat bisa membuat pakan sendiri, harapannya seperti begitu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen yang kemarin langsung menanggapi mesin pakan untuk beberapa daerah pesisir di pulau Buru dan Tual di Maluku, Seram Barat juga. Usulan untuk pakan mandiri kami minta agar ke depan bisa ditambahkan.

Pak Menteri, di anggaran ini KKP merencanakan ya misalnya 2023 itu, saya membaca bahwa justru ada impor tepung ikan tahun 2021 lebih dari 1 triliun. Begitu bisa dibayangkan ini kalau tepung ikan diproduksi secara mandiri dengan kualitas dan kuantitas yang baik maka dapat mendorong perkembangan industri tepung ikan dalam negeri itu sendiri. *Nah*, olehnya itu ke depan kita sama-sama menggenjot ya dalam laporannya Pak Menteri sampaikan bahwa sektor budidaya ini belum sampai 10%, Pak Menteri, sehingga mungkin dalam kunjungan Pak Menteri juga ke Indonesia Timur ya kemarin bersama-sama dengan Presiden sudah melihat untuk kesekian kalinya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. *Nah*, mohon ada nanti kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupatennya seperti apa, kami juga siap untuk bisa sama-sama kita diskusi khusus kalau misalnya ada FGD khusus terkait dengan ini. Saya minta agar bisa di dibicarakan apa lebih, lebih luas dan detail Pak Menteri.

Yang terakhir, Pak Ketua, Pak Menteri, saya ulang lagi soal kebijakan penangkapan terukur, Pak. Dalam jawaban yang disampaikan kepada saya, saya sudah membacakan mendalaminya bahwa kemarin saya menanyakan di mana ruang untuk nelayan-nelayan kecil kita. Di sini jawabannya bagi nelayan kecil diperuntukkan kuota nelayan lokal di WPP 571, 712 dan 713. Pak Menteri, saya tidak tahu siapa yang menjawab ini tapi terus terang saya *waduh* sedih, Pak Menteri, ini kemarin saya tanya di WPP 715, 718 tapi kemudian

jawabannya nelayan kecil ke 571 di Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian 712 di Pulau Jawa, 713 di kawasan konservasi. *Waduh*, saya tidak, makanya kemarin saya tanya jawaban dari pertanyaan saya Pak Menteri. Kalau hari ini jawabannya seperti ini, ini rapat kita ini kadang-kadang disaksikan langsung oleh masyarakat begitu *loh*. Jadi saya minta benar-benar jawaban yang disampaikan ke kami itu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kami sudah sering menyampaikan di sini kalau seperti ini berarti nelayan kita ini benar-benar ini dipinggirkan ini, ini harus dialami lagi saya minta.

Kemarin kita FGD untuk bicara mana *sih* RPP-nya itu, kita bahas ayat per ayat ataupun drafnya itu diberikan kepada kami, agar juga bisa kami dalam bersama, bersama dengan Pemerintah agar ketika diimplementasikan sudah tidak ada lagi persoalan, Pak Menteri. Ini catatan ini jangan sampai kayak begini. Kalau Pak Menteri geleng-geleng kepala berarti jawabannya tidak benar ya Pak Menteri ya? Ini jawaban ini berarti tidak dipertanggungjawabkan ke kami ya Pak Menteri ya? Ya, izin Pak Ketua, ini saya tidak tahu ini yang biasa tulis jawaban-jawaban kami ini dari pendalaman-pendalaman Raker ataupun RDP ini, saya minta agar sebelum disampaikan ke Anggota disampaikan dulu lah minimal ke Pak Sekjen atau para Dirjen atau Pak Menteri bisa melihatnya karena bias nanti, Pak Menteri. Ini bisa ada pada satu kesimpulan berarti, di mana *sih* ruang untuk nelayan kecil.

Kalau di dalam data, Pak Menteri, ini dari tahun ke tahun jumlah nelayan kita itu turun. Ini saya *googling* di internet begitu. Saya tidak tahu bagaimana dengan data dari KKP begitu apalagi nanti dengan kebijakan penangkapan terukur yang kemarin saya tanyakan. Apakah ini semacam privatisasi ataupun semacam liberalisasi. *Nah*, kemudian kalau itu memang benar, *waduh*, ini karpet merah banget, Pak Menteri. *Nah*, padahal sudah sosialisasi ke mana-mana.

Dan mungkin catatan terakhir, Pak Menteri. Saya berpikir bahwa di Indonesia ini rezim kita itu adalah rezim perizinan, Pak Menteri, bukan rezim kontrak. Ini mohon maaf saya memberikan catatan, kenapa? karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 itu "*kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*" begitu. Kenapa kita tidak mengoptimalkan BUMN ataupun nelayan-nelayan kita untuk bisa bagaimana dioptimalkan. Kemudian negara mengintervensi membantu agar ruang-ruang yang memang benar mereka para nelayan kita ini bisa leluasa. Ini mohon maaf, Pak Menteri, saya menanyakan kepada teman-teman yang selama ini berada di dermaga ataupun di kabupaten, mereka mengeluh Pak Menteri soal aturan PP berapa yang tentang PNBP ya? 85 ya. *Nah*, di PP 85 itu, itu mohon kalau saya salah di kita diskusi ya Pak Menteri ya, ini disampaikan bahwa kalau selama ini ada bagiannya untuk daerah, begitu, tetapi di PP 85 ini yang sudah diimplementasikan nelayan yang datang ataupun kapal-kapal ikan yang datang timbang langsung masuk ke kas negara tanpa ada retribusi kepada daerah yang sebelum penerapan PP 85 ini, daerah dapat bagian. *Nah*, ini kalau Pak Zaini geleng-geleng, kita perlu konfirmasi Pak. Di Aru, saya mendapatkan itu maka mereka menyampaikan aspirasinya tolong PP 85. Mohon maaf, Pak Zaini, Pak Menteri, kami ini benar 93% luas lautan tapi dengan adanya kewenangan misalnya Undang-Undang

23, 24 tentang Pemerintahan Daerah itu kami justru merasa bahwa luasan lautan kami itu hanya sepanjang mata memandang begitu karena kapal-kapal yang menangkap ikan izinnnya seluruh ke negara. Kemudian juga kalau misalnya dengan PP 85, kemudian juga dengan kebijakan penangkapan terukur ini semuanya ke negara. Rumusnya Pak Menteri, dikembalikan ke daerah dalam bentuk DAU dan DAK. Luas lautan tidak dihitung, Pak, luas lautan tidak dihitung, saya sampaikan sekali lagi, sehingga Maluku yang luasannya itu lima kali Pulau Jawa kalau dihitung dengan lautannya itu akan tetap miskin begitu karena memang rentang kendali yang teramat jauh, kemudian juga luas lautan kami yang luas lautan daerah-daerah kepulauan itu, itu juga harusnya bisa mendapatkan apa namanya *feedback* yang setimpallah agar bisa pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan bisa berimbang dari adanya kekayaan laut yang dimiliki dari sektor kelautan.

Nah, olehnya itu mungkin sebelum segala implementasi dari kebijakan-kebijakan ini dilaksanakan, kami minta agar kita bisa diskusi. Mau diskusinya, Pak Menteri selalu sampaikan, silakan Bu diskusinya kita bisa undang beberapa *stakeholder* ataupun FGD ya kami minta Pak Menteri sekali lagi, sebelum diimplementasikan kita diskusi dulu undang semua *stakeholder* yang berkepentingan agar pantaslah layak daerah dapat berapa, nelayan juga dapat ruang untuk bisa mendapatkan kesejahteraannya.

Itu dari saya, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Bu Alien. Silakan Bu Alien.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Baik, terima kasih Ketua Budi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi semua,

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi IV, Pak Menteri beserta jajaran Eselon I dan lainnya,

Ada juga Direktur Perikanan Indonesia, kalau bisa Kakak, kita juga minta diberikan bicara juga ini Perindo. Ada yang disampaikan karena jangan datang ke sini saja cuman duduk tidak berbicara.

Pak Menteri, langsung saja karena memang sudah banyak disampaikan. Tentunya mungkin sudah ke sekian kali Pak Menteri harus menjelaskan kembali tentang penjabaran kebijakan penangkapan terukur ini, tapi ya sejauh memang harus bisa dijelaskan, tolong dijelaskan karena memang di lapangan masih terdapat simpang-siur, Pak, termasuk dengan dikirakannya bahwa PP 85 termasuk penangkapan terukur itu sudah diberlakukan. Apakah ini kurangnya sosialisasi atau kurang pemahaman atau kurang pemberitahuan?

Terus tentunya tentang PSDKP, kami kemarin pergi dan *alhamdulillah* dari Tanjung Pinang sampai ke Batam ternyata itulah anggaran terakhir untuk dipakai di Kapal 017 kalau enggak salah, 07 ya sudahlah itu namanya. Saya bilang ke Ketua begini waktu itu, "Ini ada kesengajaan" karena memang sudah enggak ada anggaran, sementara kita masih punya tiga bulan lagi untuk operasi masalaya. Bagaimana tentang penangkapan *illegal fishing* tapi di luar dari itu saya harus mengapresiasi KKP dengan penangkapan illegal BBL yang dilakukan oleh PSDKP dan ternyata Pak Menteri, luar biasa gajinya Rp3.000.000,00 per orang dan waktu mau pulang ke salah satu, kaptennya mau pulang ke Manado di tempatnya Pak Viktor dulu beroperasi, itu tidak sanggup membayar tiketnya. Ini harus menjadi atensi semua. Tolong mungkin kalau memang bisa anggaran ya dinaikkanlah karena mereka yang menjaga perairan laut kita.

Kemudian Pak Menteri, sebenarnya kalau untuk jawaban yang disampaikan oleh KKP, *feedback*-nya kalau kita baca memang agak sedikit lucu-lucu. Saya enggak tahu itu setelah dibaca, disampaikan oleh Anggota DPR, apakah disetujui oleh Setjen terus dikirimkan ke DPR atau tidak. Semoga ini the *last one* lah, jangan sampai terjadi lagi. Tolong setiap Dirjen dicek kembali jawaban yang sudah disampaikan oleh Anggota DPR. Jangan kalian pikir kita tanya ini jadi permainan begitu karena kita harus bertanggung jawab dan ini *live* rapatnya. Selalu Pak Menteri sampaikan akan kami jawab secara tertulis, berarti tertulis berarti itu *agreement* dari kemitraan.

Kemudian kemarin kami juga meminta tentang daftar, Pak Menteri, memang BBM ini sudah sangat langka. Kalau memang kita sudah ada zonasi-zonasi atau daftar desa-desa nelayan, tolonglah kita juga tahu bagaimana untuk kerjasamanya dengan BUMN masalah tentang kelangkaan BBM ini.

Kemudian untuk Pak Zaini, kemarin kita sudah sempat menyampaikan tentang pelabuhan sandar apung untuk nelayan kecil. Saya melihat di anggarannya ini belum ada ini bagaimana pengalokasian. Pak Menteri kemarin kami pergi ke tempat-tempat yang ada penangkapan *illegal fishing* itu, kapal-kapalnya mangkrak sampai rusak begitu tapi *alhamdulillah*, kemarin ada juga yang mau diserahkan di beberapa universitas. Ini berarti sudah ada satu kemajuan bahwa kapal yang ditangkap itu tidak hanya mangkrak di pelabuhan saja di daerah yang sudah ditetapkan tapi juga diberikan kepada universitas untuk dipergunakan kembali.

Untuk, tadi saya dengar ada beberapa yang menanyakan tentang soal bioflok. Kami kan tahu kemarin *targetting* penganggaran untuk tahun 2023 itu

hampir 8 triliun tapi yang disahkan juga cuma 6, berarti ya tidak sesuai dengan ekspektasi tapi mungkin ada penyesuaian penganggaran. Mudah-mudahan untuk tahun 2023 ini kita sudah mendapatkan hasil yang luar biasa, yang tentunya KKP sudah melakukan langkah-langkah taktis dan mudah-mudahan di 2022 ini selesai budidaya udang atau *shrimp estate* yang ada di Kebumen.

Untuk *targetting* NTN, Pak Menteri, memang sering menjadi pertanyaan semua tapi kita harus mencari solusi apa yang baik untuk menaikkan nilai tukar nelayan ini, Pak Menteri. Di... apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Karena ini sudah jam 1, biasanya kalau Kakak Budi ini memimpin jam 1 *tuh* harus *break*. Saya tertib taat patuh sesuai aturan.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bu Alien.

Kayaknya sudah enggak ada lagi. Jadi kalau enggak ada lagi, mendingan kita persilakan Pak Menteri untuk memberikan jawabannya. Terus kita selesaikan secara adat secepatnya, begitu. Bagaimana teman-teman Anggota setuju enggak?

Pak Menteri, kami persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih Pimpinan.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan maaf, Pak Menteri maaf.

Tolong yang *on the point* saja ya, Pak Menteri. Kalau yang tertulis jangan sampai enggak sesuai saja, jadi tolong dijawab dengan baik, Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih.

Yang pertama saya mohon maaf atas jawaban tertulis yang masih tidak sesuai, tapi saya kira terhadap hal yang masih belum *clear* akan saya minta segera untuk kita melakukan FGD, supaya di situ betul-betul bisa jelas khususnya untuk penangkapan ikan terukur. Niatnya sudah pasti situ tidak ada yang namanya... justru di situ misinya adalah untuk supaya nelayan di lokasi itu menjadi tuan rumah, itu niatnya. Nanti bisa dilihat *kok* dari hitungannya dan

sebagainya dan juga termasuk RPP. Kenapa ada PP yang kita desain, yang kita ajukan itu salah satunya perlindungan terhadap nelayan dan sekaligus juga tumbuhnya ekonomi di wilayah itu, tidak lagi menjadi Jawa sentris tapi menjadi Indonesia sentris, itu tujuannya, jadi misinya ke sana.

Nah, selanjutnya tadi yang cukup banyak dipertanyakan soal Bimtek. Jadi, kami bisa sampaikan bahwa saya setuju untuk kemudian kita koreksi dan kita perbaiki, tapi yang pasti apapun namanya bahwa kehadiran para petugas KKP yang ke lokasi, itu benar-benar tidak mengganggu atau menggunakan anggaran Bimtek itu sendiri, tapi menggunakan anggaran yang lain yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, maaf saya potong, ini karena tadi permasalahan perikanan penangkapan ikan terukur ini kan sudah menjadi atensi banyak Anggota dan sesuai kesepakatan Raker memang akan diadakan FGD. Boleh enggak kita konkretkan saja, tanggal untuk FGD tersebut?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya minta Pimpinan, mungkin yang terbaik di hari apa, di bulan apa, kita siap.

KETUA RAPAT:

Ini saya, saya merasa bahwa ini sudah menjadi isu yang cukup krusial....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Awal Oktober

KETUA RAPAT:

Saya tawarkan tanggal 4 Oktober *eh* tanggal 3 maaf, tanggal 4 Oktober adalah penutupan masa sidang. Kalau saya boleh usul, tanggal 3 Oktober memungkinkan enggak?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Boleh, kita bisa tanggal 3.

KETUA RAPAT:

Bagaimana teman-teman setuju enggak tanggal 3, bagaimana tanggal 3 itu? 3 Oktober itu sehari sebelum penutupan masa sidang, itu hari Senin. Saya silakan rekan-rekan. Bagaimana? Pak Menteri, kalau kita boleh usul kita targetkan tanggal 3 Oktober.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya oke, terima kasih Pak Menteri.

Silakan, maaf.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Selanjutnya dari Bu Yessy Melania Nasdem, bioflok dan mesin pakan sudah diganti dengan kincir dan KJA. Ini sudah enggak ada. Kemudian soal dana transfer, soal DAK, kewenangan perencanaan bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu. Jadi sebetulnya kita mengusulkan, lalu kemudian penentunya adalah di Bappenas dan Kemenkeu. Kita hanya... kita sudah mengajukan lalu kemudian hasil yang ditentukan adalah dari mereka dari Bappenas dan Kemenkeu.

Saya kira kemudian yang berikut soal PSDKP. PSDKP tadi dikatakan bahwa ya anggarannya tidak cukup, memang anggarannya tidak cukup tapi satu hal ke depan dengan implementasi penangkapan ikan terukur itu basisnya adalah teknologi satelit. Nanti tanggal 27, kami akan mengundang Pimpinan Komisi IV atau mungkin ada Anggota yang ingin hadir untuk melihat. Jadi nanti kalau Ibu Saadiyah mau ikut juga boleh. Kita bisa melihat betul pada hari itu kapal yang beroperasi itu ada berapa ribu bisa kita lihat dan kita bisa, bisa kita *detect* bahwa kapal itu punya izin atau tidak dan kapal itu kemudian dia menangkapnya ke mana dan bisa di *track* dia lari ke mana saja dan dia mendaratkan di mana.

Yang kemudian yang kedua, ke depan soal tadi pendaratan. Jadi tadi ditanya sama Mas yang di Kepri misalnya kenapa penangkapan terukur misalnya pendaratannya di beberapa titik lalu bagaimana dengan nelayan tradisional. Saya sudah minta kepada Dirjen Tangkap untuk dialokasikan satu, satu anggaran khusus. Jadi misalnya kami punya sisa anggaran berapa setelah dikurangi dengan anggaran apa namanya dikurangi gaji dan tunjangan, anggaran yang berkepentingan aspirasi masyarakat masih ada program. Saya minta dibuat khusus untuk kemudian bisa membuat pelabuhan-pelabuhan untuk memperbaiki pelabuhan di kampung-kampung nelayan. Jadi bukan hanya pelabuhan tapi termasuk *dock*. Jadi salah satu contoh kemarin waktu saya ke Jawa Tengah di Kendal itu pelabuhannya kali lalu kemudian *dock*-nya tidak ada. Itu juga salah satu yang menjadi prioritas selain juga kita sudah membuat *list* dan minta kepada Menteri PUPR untuk membantu kita juga untuk melakukan pembangunan atau pengerukan pelabuhan-pelabuhan yang di muara-muara besar.

Saya kira demikian Pimpinan yang bisa saya sampaikan. Banyak hal yang lain dan sekali lagi saya mohon maaf untuk jawaban berikutnya tertulis. Saya kira, saya akan atensi betul untuk kemudian kami lihat apa yang akan

disampaikan oleh Komisi IV dan terhadap yang lalu ada beberapa *miss* informasi saya mohon maaf.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Izin, Pak Ketua. Izin.

KETUA RAPAT:

Masih ada Pak Salim?

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Sedikit ya Pak Salim ya.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Ini karena waktu sudah kita janji jam 2 , sebelum jam 2 berarti kita tertib.

KETUA RAPAT:

Tertib kalau bisa sebelum 13.30 ya.

Silakan, silakan, silakan.

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Saya menanggapi jawaban Pak Menteri masalah DAK. Pak Menteri, kita paham Pak Menteri, penentu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, khusus DAK di lingkup KKP kami mohon kementerian berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Artinya apa, kami malu Pak Menteri, ini kan permainan para pimpinan daerah yang langsung ke Bappenas dan ke Kementerian Keuangan. Kita tidak bisa salahkan pimpinan daerah tersebut karena dia ingin mendapatkan anggaran. Namun, kalau pihak kementerian mengkomunikasikan dengan dia, 54 Anggota Komisi IV, apa salahnya terakomodir di daerah pemilihannya ada dana DAK yang eh ... DAK penugasan kah DAK khusus kah supaya malu kami, Pak Menteri, itu saja cuman persoalannya, Pak. Kan sama juga 54 daerah ini kan Indonesia juga agar kami punya nama di daerah masing-masing, itu saja sekedar masukan Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri mau ditanggapi? Memang Bang Salim belum punya nama di daerah, Bang Salim?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pak Salim.

Kami akan tindaklanjuti.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri.

Bapak-Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Sebelum kami akhiri acara Raker hari ini

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Pimpinan. Mohon maaf Pimpinan.

Kemarin Pimpinan saya, Pak Sudin menyampaikan bahwa apakah di KKP ini tidak diberikan spesialisasi seperti di Kementan bahwa *automatic adjustment*-nya itu bisa dikembalikan atau tidak begitu karena mohon maaf, Pak Menteri, kemarin waktu kita Raker bulan lalu *kan* saya sudah sampaikan bahwa ini ada masa layar yang sudah berhenti karena memang tidak ada anggarannya. Alasan tersebutlah bisa dikembalikan lagi *automatic adjustment* seperti yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jadi, Kementerian Pertanian itu dikembalikan *automatic adjustment* hampir kurang lebih 900 miliar dengan kebutuhan *urgent*. Ini juga kami harapkan di KKP bisa dikembalikan *automatic adjustment* dengan alasan tersebut. Saya berharap ini menjadi satu kesimpulan, karena kemarin saya mau masukin kesimpulan pada bilang enggak usah. Padahal, itu penting sekali, Pak Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bisa tolong ditanggapi dulu Pak Menteri, masukan dari Bu Alien.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ya, saya kira kita akan lakukan, saya setuju untuk dimasukkan dalam kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Oke. Sebelum kami akhiri rapat kerja ini, kita bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Tolong ditampilkan.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp6.767.656.876.000,00 dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp678.157.401.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp85.311.317.000,00;
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp955.652.399.000,00;
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1.181.634.862.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.151.263.731.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp388.500.000.000,00;
 - g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp420.000.000.000,00;
 - h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.383.637.166.000,00; dan
 - i. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp523.500.000.000,00.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

Komisi IV?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Suhardi.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Prinsipnya semua kesimpulan yang akan dibacakan, saya setuju dan mohon izin saya, Pak Menteri, saya ada Rapat Banggar jam 13.00, Pak Salim juga kayaknya. Ya mohon izin, Pimpinan. Ya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Suhardi Duka.

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menaikkan anggaran operasional kapal pengawas dan memberikan penghargaan kesejahteraan kepada awak kapal pengawas sumber daya kelautan perikanan yang berprestasi memberantas pelaku IUU *Fishing* dan menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) di seluruh perairan Indonesia.

Komisi IV? Bang Salim setuju, Bang Salim?

F-P. GOLKAR (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri silakan. Pak Menteri setuju?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

“Penghargaan” saja mungkin ya “kesejahteraan”nya jangan ditulis.

KETUA RAPAT:

“Memberikan penghargaan”. Usulnya “penghargaan” tapi “kesejahteraan”nya dihapus.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Ini kalau anggarannya banyak baru bisa bikin kesejahteraan ya kan Ketua, Pimpinan. Jadi, saya setuju memang kemarin mungkin kemarin diberikan apresiasi dari kinerja yang sudah mereka lakukan untuk kenaikan pangkatkah atau apakah atau sebagainya karena memang anggarannya juga terbatas begitu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kita berikan penghargaan ya. “Kesejahteraan” tolong dihapus kepada

Komisi IV? Setuju. Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Tadi mau Bu Alien bisa di ... eh merangkaikan kata-katanya enggak?

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk, bahasa kita kemarin untuk meminta...”, ini c.q.-nya ke ini ya Menteri Keuangan ya. Bahasanya seperti kayak kemarin Mas Eko, bahasanya seperti di Kementerian Pertanian “untuk mengembalikan *automatic adjustment* terhadap Kementerian Kelautan Perikanan dikarenakan....”

Ya, ini Kakak Ansi ini seharusnya ini Doktor Prof.

KETUA RAPAT:

Seharusnya setiap kali pembacaan kesimpulan itu harusnya yang membacakan Pak Ansi supaya tata kelola ke kalimat itu sudah benar enggak bisa diperdebatkan lagi.

Pak Ansi, silakan Pak Ansi.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS):

Ini targetnya kita pengembalian *automatic adjustment* karena terbatasnya anggaran KKP untuk, atau enggak perlu masuk PSDKP juga boleh, kalau enggak mau.

KETUA RAPAT:

Oke, coba ya. Kesimpulan nomor 3.

3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembalikan *automatic adjustment* tahun 2022 guna mendukung operasional kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komisi IV?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Pak Ketua maaf,

Ini sudah disetujui dan saya sudah setuju tetapi memang saya pikir memang harus ada rasionalisasi yang meyakinkan bahwa benar-benar KKP ini butuh untuk dikembalikan. Artinya apa? Argumentasinya harus kuat buat apa dengan skema yang jelas begitu. Saya hanya, jangan sampai misalnya, oh ya ini hanya untuk ABC tapi enggak ada rasionalisasi.

Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ketua.

Demikian rancangan kesimpulan rapat dan kami persilakan sebelum kami mengakhiri rapat kerja hari ini, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan kata mutiaranya.

Terima kasih.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang hadir,

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan masukan untuk agar kinerja kita lebih baik lagi. Kami menyadari banyak hal yang masih kurang dan juga adanya keterbatasan-keterbatasan tentunya yang sudah kita ketahui bersama dan itu yang kemudian kita akan lakukan secara optimum untuk bisa mencapai yang terbaik demi kesejahteraan nelayan kita ke depan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan kekhilafan.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, rapat kerja ini kami tutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002